



# Gender

dalam skema Imbal Jasa Lingkungan

Studi kasus di Singkarak, Sumberjaya, dan Sesot

**Editor:**

Beria Leimona, Siti Amanah,  
Rachman Pasha, Chandra I. Wijaya



World Agroforestry Centre

# Gender

dalam skema Imbal Jasa Lingkungan

Studi kasus di Singkarak, Sumberjaya, dan Sesaot

**Editor:**

Beria Leimona  
Siti Amanah  
Rachman Pasha  
Chandra I. Wijaya

Kerjasama

World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program,  
The Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI)

dan

Pusat Kajian Gender dan Anak  
(d/h Program Studi Wanita/PSW-Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan)  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Institut Pertanian Bogor

**2013**

## Sitasi

Leimona B, Amanah S, Pasha R, Wijaya CI. 2013. *Gender dalam skema Imbal Jasa Lingkungan. Studi kasus di Singkarak, Sumberjaya, dan Sesaot*. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program. 86p.

## Pernyataan hak cipta

World Agroforestry Centre (ICRAF) adalah pemilik hak cipta publikasi ini, namun memperbolehkan untuk tujuan non-komersial diperbolehkan tanpa batas dengan tidak merubah isi. Untuk memperbolehkan tersebut, nama pengarang dan penerbit asli harus disebutkan. Informasi dalam buku ini adalah akurat sepanjang pengetahuan ICRAF, namun kami tidak menjamin dan tidak bertanggung jawab seandainya timbul kerugian dari penggunaan informasi dalam buku ini.

**ISBN** 978-979-3198-72-9

## Kontak

Beria Leimona (l.beria@cgiar.org)

World Agroforestry Centre  
Southeast Asia Regional Office  
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115  
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia  
Tel: +62 251 8625415  
Fax: +62 251 8625416  
Email: icraf-indonesia@cgiar.org  
[http://www.worldagroforestry.org/regions/southeast\\_asia](http://www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia)

## Editor

Beria Leimona, Siti Amanah, Rachman Pasha, Chandra I. Wijaya

## Foto sampul depan

Trudy O'Connor, Rachman Pasha, dan The Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI)

## Desain dan tata letak

Sadewa (sadewa@cgiar.org)

**2013**

# Prakata

---

Integrasi gender dalam skema Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sangat penting dilakukan mengingat selama ini persoalan lingkungan masih dipersepsikan sebagai ranah laki-laki. Dalam kenyataannya, pengelolaan lahan ramah lingkungan bagi pelestarian lingkungan dan penghidupan masyarakat tidak terlepas dari peran perempuan dan laki-laki. Skema IJL sebagai salah satu opsi dalam mencapai kedua tujuan tersebut memerlukan kolaborasi antar anggota masyarakat, terutama dalam konteks relasi gender secara setara dan adil.

Penelitian dan analisis mengenai relasi gender dalam skema IJL masih terbatas di Indonesia. Atas dasar itu, penulis dan tim editor berharap buku ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi penjaminan keberlanjutan skema IJL oleh masyarakat dan pihak terkait. Sekaligus, dapat mendukung keterjaminan kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan upaya nyata pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015.

Dengan diselesaikannya penulisan dan penyusunan buku ini ini, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. *International Fund for Agriculture Development (IFAD)* atas dukungan finansial dalam penelitian yang menjadi basis dalam penyusunan buku.
2. Tim peneliti dari *The World Agroforestry Centre (ICRAF) – Southeast Asia Regional Office*, terutama Elok Mulyoutami dan Noviana Khususiyah atas masukannya yang berharga, serta tim disain dari Unit *Desktop Publishing* atas dukungannya.
3. Tim peneliti lapang dari *The Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI)* atas kontribusi dalam penyediaan data hasil survei, dukungan dalam pelaksanaan diskusi kelompok terfokus, dan *transect walks*.
4. Tim peneliti dari PSW-PSP3 LPPM IPB atas kerjasama dalam kegiatan studi.

5. Tokoh masyarakat dan masyarakat di Singkarak, Sumberjaya dan Sesaot yang telah berkontribusi terhadap data dan informasi dan mendukung kelancaran studi.
6. Pihak-pihak lain yang telah memungkinkan kami dapat bekerja dengan baik dalam keseluruhan kegiatan penelitian ini.

Buku ini merupakan edisi perdana dari penulisan isu gender dalam suatu skema IJL, sehingga jika ada kesilapan merupakan hal yang tak dapat dihindari sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kami terbuka atas saran dan kritik membangun untuk edisi revisi. Atas perhatian pembaca, kami ucapkan terima kasih.

Bogor, Januari 2014

**Tim Editor dan Penulis**

# Daftar Isi

---

Prakata .....	i
---------------	---

## **Bab 1. Memahami isu gender dalam Imbal Jasa**

### **Lingkungan .....**

1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Urgensi mengintegrasikan gender dalam pembangunan .....	4
1.3. Imbal Jasa Lingkungan di Indonesia .....	8
1.4. Fokus studi dan kerangka pendekatan.....	11
1.4.1. Fokus studi .....	11
1.4.2. Kerangka pendekatan .....	11
1.5. Pelaksanaan studi .....	13
1.5.1. Tahap pemahaman kondisi umum masyarakat.....	14
1.5.2. Tahap pemetaan dan analisis gender.....	15
1.5.3. Tahap analisis kebijakan berperspektif gender .....	16
1.5.4. Data dan analisis data .....	16
1.5.5. Analisis data .....	17

## **Bab 2. Profil komunitas di tiga lokasi studi IJL .....**

2.1. Kondisi umum lokasi .....	19
2.2. Karakteristik demografi.....	25
2.3. Kondisi sosial ekonomi.....	28
2.3.1. Sosial budaya .....	28
2.3.2. Mata pencaharian .....	28
2.3.3. Tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga .....	29
2.4. Kelembagaan lokal .....	31
2.5. <i>Transect walks</i> (jalur transek) .....	33
2.6. Skema Imbal Jasa Lingkungan.....	39
2.6.1. Skema Imbal Jasa Lingkungan di Singkarak .....	39
2.6.2. Skema Imbal Jasa Lingkungan di Sumberjaya .....	40
2.6.3. Skema Imbal Jasa Lingkungan di Sesaot.....	41

## **Bab 3. Isu gender dalam skema IJL di tiga lokasi .....**

3.1. Persepsi perempuan dan laki-laki tentang gender .....	47
3.2. Profil aktivitas domestik dan publik.....	49

3.2.1. Profil aktifitas domestik dan publik.....	49
3.2.2. Profil akses terhadap sumberdaya dan manfaat .....	53
3.2.3. Profil kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat ....	54
3.3. Partisipasi perempuan dan laki-laki dalam skema IJL .....	56
<b>Bab 4. Skema IJL yang sensitif dan responsif gender .....</b>	<b>61</b>
4.1. Konsep dan paradigma skema IJL .....	62
4.1.1. Paradigma CES: komoditisasi jasa lingkungan .....	64
4.1.2. Paradigma COS: kompensasi jasa lingkungan .....	65
4.1.3. Paradigma CIS: ko-investasi jasa lingkungan .....	66
4.2. Sensitifitas gender dan rekomendasi dalam skema IJL.....	67
4.2.1. Rekomendasi responsif gender skema IJL berdasarkan analisis kebutuhan gender .....	67
4.2.2. Tolok ukur dan indikator skema responsif gender .....	73
<b>Bab 5. Temuan kunci dan rekomendasi .....</b>	<b>75</b>
5.1. Isu kunci gender.....	76
5.2. IJL responsif dan sensitif gender.....	78
<b>Daftar pustaka .....</b>	<b>83</b>

# Daftar Tabel

---

Tabel 1.1. Prasyarat Pengarusutamaan Gender.....	6
Tabel 1.2. Siklus manajemen pembangunan gender dan intervensi kegiatan.....	7
Tabel 1.3. Responden di tiga lokasi .....	14
Tabel 2.1. Penggunaan lahan di Nagari Paninggahan 2009 .....	20
Tabel 2.2. Demografi di tiga wilayah studi .....	26
Tabel 2.3. Perbandingan jumlah penduduk di tiga lokasi studi .....	27
Tabel 2.4. Pendapatan rumah tangga menurut sumbernya (Rp/kapita/tahun) .....	29
Tabel 2.5. Rata-rata pengeluaran pertanian dan pengeluaran rumah tangga .....	31
Tabel 2.6. Analisis hasil <i>transect walks</i> di tiga lokasi studi .....	37
Tabel 3.1. Deskripsi skema IJL di tiga lokasi studi .....	45
Tabel 3.2. Hasil FGD tentang ciri-ciri laki-laki dan perempuan disarikan dari FGD1 dan 2 .....	47
Tabel 3.3. Profil pembagian kerja dalam aktivitas domestik dan publik di tiga wilayah .....	49
Tabel 3.4. Tingkat akses terhadap sumberdaya dan manfaat IJL di tiga lokasi.....	53
Tabel 3.5. Kontrol atas aktivitas domestik di tiga lokasi.....	54
Tabel 3.6. Tingkat kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat IJL di tiga lokasi.....	56
Tabel 3.7. Partisipasi dalam tahapan kegiatan perencanaan.....	57
Tabel 3.8. Partisipasi dalam tahapan kegiatan pelaksanaan.....	59
Tabel 3.9. Partisipasi dalam tahapan kegiatan pemantauan dan evaluasi .....	59
Tabel 3.10. Partisipasi dalam tahapan kegiatan tindak lanjut .....	60
Tabel 4.1. Kompilasi skema IJL di tiga lokasi dengan tingkat kondisionalitas dan paradigma IJL .....	66
Tabel 4.2. Kebutuhan gender praktis dan rekomendasi responsif gender dalam skema IJL .....	69
Tabel 4.3. Contoh tolok ukur manfaat dan indikator dengan disagregasi data terpilah menurut perempuan dan laki-laki.....	74





# Daftar Gambar

---

Gambar 1.1. Skema pendekatan RUPES berperspektif gender .....	12
Gambar 1.2. Alur pelaksanaan studi .....	14
Gambar 2.1. Peta lokasi studi di Singkarak, Sumatera Barat .....	19
Gambar 2.2. Peta situasi Dusun Buluh Kapur (ICRAF, 2008).....	21
Gambar 2.3. Peta kawasan Hutan Sesaot .....	24
Gambar 2.4. Peta transek bentang lahan di Nagari Paninggahan .....	33
Gambar 2.5. Peta transek bentang lahan lokasi Peduli Sungai Buluh Kapur Lampung .....	34
Gambar 2.6. Peta transek bentang lahan lokasi Hkm Sesaot .....	35
Gambar 2.7. Skema umum proses pengembangan jasa lingkungan di Lombok .....	43
Gambar 4.1. Tingkat kondisionalitas dari skema Imbal Jasa Lingkungan. ....	64



THE SYDNEY OPERA HOUSE AND  
HARBOUR BRIDGE AT DUSK  
*Present a beautiful array of ever changing colour*

THE SYDNEY HARBOUR  
BRIDGE & THE ROCKS  
THE SHAPE & COLOUR

Moto

CITIES

# Bab 1

---

## Memahami isu gender dalam Imbal Jasa Lingkungan

Beria Leimona, Siti Amanah, dan Rachman Pasha

### 1.1. Latar belakang

Indonesia telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kekayaan ekosistem ini menopang keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai contoh, alam menyediakan bahan makanan, sandang dan papan yang kemudian diolah menjadi berbagai produk yang berguna bagi manusia. Selain itu, hamparan hutan di Indonesia sebagai ekosistem tropis menyerap karbon di udara dan menjadikan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Perilaku over-eksploitatif yang berorientasi kepentingan manusia semata dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kerusakan ekosistem dan sebagai dampaknya akan mengancam kehidupan di bumi. Dalam mengatasi kerusakan ekosistem yang semakin parah, *Millenium Ecosystem Assessment* (MA 2005) memperkenalkan konsep “jasa lingkungan” (*ecosystem services*).

Jasa Lingkungan (jasling) memiliki arti “manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem” (MA 2005). Jasling dijabarkan memiliki fungsi penyediaan produk (makanan, air bersih, kayu, serat, bahan bakar, dan sebagainya), fungsi pengaturan (terhadap iklim yang nyaman, pencegah banjir, pemurnian air, pencegahan penyebaran penyakit menular dan sebagainya), fungsi pendukung (terhadap perputaran nutrisi, pembentukan tanah dan sebagainya), dan fungsi budaya (keindahan, spiritual, edukasi dan rekreasi).

Skema Imbal Jasa Lingkungan (IJL) atau *rewards for environmental services*<sup>1</sup> merupakan salah satu skema inovatif yang berpeluang untuk dikembangkan karena skema tersebut memberikan insentif bagi penyedia jasa lingkungan agar dapat secara berkelanjutan menyuplai jasa lingkungan bagi masyarakat secara luas. Skema IJL mendukung peran masyarakat menjaga lingkungan melalui praktek pengelolaan lahan ramah lingkungan. Masyarakat penyedia jasa lingkungan berhak memperoleh imbalan atas jasa lingkungan yang mereka suplai sesuai dengan berbagai pencapaian yang terukur dan disepakati dalam kontrak IJL antara penyedia dengan pemanfaat jasa lingkungan.

*Rewards for use of and Shared Investment in Pro Poor Environmental Services schemes* (RUPES) merupakan sebuah program penelitian aksi (*action research*) yang dikembangkan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) melalui pendanaan dari *International Fund for Agricultural Development* (IFAD). RUPES memiliki fokus mengembangkan skema IJL di berbagai negara di Asia yang memiliki beragam kekhasan lokasi. RUPES bertujuan mengintegrasikan skema IJL ke dalam berbagai program pembangunan pedesaan untuk mengurangi kemiskinan dan melestarikan lingkungan alam<sup>2</sup>. Kawasan lingkungan dan sumber daya alam yang dikelola dengan baik oleh masyarakat dapat berkontribusi bagi peningkatan tata kelola air, penjaminan keanekaragaman hayati, pelestarian daerah aliran sungai, dan peningkatan modal kehidupan manusia berkelanjutan. Modal tersebut meliputi alam, sumber daya manusia, finansial, infrastruktur, dan ketahanan sosial, dikenal sebagai *sustainable livelihood capitals* (van Noordwijk dan Leimona 2010; Leimona *et al.* 2010).

Di Indonesia, skema IJL masih terus berkembang dan sampai saat buku ini diterbitkan, para penggiat skema IJL terus berkonsentrasi pada pengenalan konsep, ujicoba di lapangan dan advokasi perangkat kebijakan pendukung IJL. Pengalaman ICRAF di Indonesia memperlihatkan bahwa masyarakat merupakan aktor penting dalam menjaga kondisi sumber daya alam. Sebagai contoh di Sumberjaya,

---

1 *Perbedaan istilah pembayaran jasa lingkungan dan imbal jasa lingkungan dibahas lebih rinci di Bagian 1.3*

2 <http://rupes.worldagroforestry.org/>



Lampung, masyarakat di kawasan daerah aliran sungai (DAS) telah berkontribusi aktif menurunkan sedimentasi sungai. Atas jasa lingkungan tersebut, masyarakat memperoleh IJL berupa sarana mikro hidro yang memang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan listrik di permukiman.

Mekanisme IJL dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, apabila dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat secara adil dan setara antara perempuan dan laki-laki dewasa dan anak-anak. Akan tetapi, kondisi saat ini menunjukkan terdapat kesenjangan pada kualitas hidup perempuan dan anak<sup>3</sup>, terutama di pedesaan. Bias gender dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam terjadi karena analisis gender jarang dilakukan secara komprehensif dalam program pengelolaan sumber daya alam. Secara spesifik, studi mengenai peranan dan bias gender dalam skema IJL belum pernah diobservasi dan dianalisis dengan baik.

Sejalan dengan berkembang pesatnya skema IJL di Indonesia dan kebutuhan akan analisis yang kuat mengenai intergrasi gender dalam tahapan skema IJL, diperlukan studi tentang gender dalam IJL. Studi isu gender dalam IJL ini dilaksanakan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) melalui program RUPES bekerja sama dengan Program Studi Wanita, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan The Indonesian

▲  
Dampak skema IJL lebih nyata jika masyarakat - perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak - dilibatkan secara adil setara (foto: World Agroforestry Centre)

---

3 Sebagai gambaran angka putus sekolah perempuan di pedesaan jauh lebih tinggi daripada laki-laki, bahkan ada sekitar 10% yang masih buta huruf. Begitu pula dari segi kesehatan dan ekonomi, terdapat kesenjangan dalam penyediaan akses dan layanan, perlindungan, dan pemanfaatan layanan publik tersebut.

Institute for Forest and Environment (RMI). Studi ini berfokus pada analisis gender dalam Program RUPES di tiga tipologi wilayah: Sumberjaya (Lampung), Singkarak (Sumatra Barat) dan Sesaot (NTB). Wilayah mewakili kekhasan tipologi, yakni adanya IJL tata kelola DAS (Sumberjaya), IJL pasar karbon sukarela (Singkarak) dan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Sesaot). Asumsi studi ini adalah perempuan dan laki-laki dapat terlibat dalam skema IJL dengan peran dan porsi yang beragam.

Sejalan dengan upaya mendorong terwujudnya skema IJL responsif gender di Indonesia, buku ini bermaksud menjelaskan tiga hal berikut. Pertama, menjelaskan kondisi masyarakat di tiga lokasi penelitian aksi (*action research sites*) terutama berkaitan dengan; (1) Partisipasi masyarakat dalam skema jasling; (2) Transek bentang lahan di masing-masing lokasi studi; (3) Peran laki-laki dan perempuan dalam skema jasling; dan (3) Faktor sosial ekonomi dan budaya yang berhubungan dengan pelaksanaan skema jasling. Kedua, menganalisis isu gender pada setiap lokasi berdasarkan profil akses dan kontrol, dan pemenuhan kebutuhan gender praktis dan strategis. Ketiga, merekomendasikan alternatif kebijakan dan strategi meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam skema jasling.

## **1.2. Urgensi mengintegrasikan gender dalam pembangunan**

Manusia merupakan pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga perilaku manusia dalam mengekstraksi sumber daya alam hendaknya tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Perilaku over-eksploitatif dalam pemanfaatan hutan, lahan, air berdampak pada kerusakan sumber daya alam. Hal ini tentunya sangat merugikan umat manusia. Pemeliharaan lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Program pemeliharaan lingkungan sebagai investasi jangka panjang bernilai ekonomi dan mengurangi kemiskinan diterapkan dalam skema IJL. Agar kemanfaatan skema IJL dapat dinikmati secara seimbang oleh masyarakat, skema IJL perlu mempertimbangkan proses-proses pengambilan keputusan yang responsif gender. Skema IJL yang responsif gender memerlukan

pertimbangan aspek gender saat desain program, pelaksanaan, sampai dengan tindak lanjut. Analisis gender dapat dilaksanakan dalam konteks mikro, meso, dan makro. Dalam skala mikro, analisis gender dapat dilakukan pada tingkat rumah tangga, pada tingkat meso dapat melingkupi organisasi, dan tingkat makro dalam lingkup nasional, seperti kebijakan dan program.

Perhatian akan kebutuhan baik perempuan mau pun laki-laki dalam pengembangan kebijakan dan program mulai berkembang pada awal 1970-an. Pengembangan kebijakan tersebut berawal dari proyek-proyek yang didesain khusus untuk perempuan (*women specific*), sampai kepada usaha melibatkan aspirasi perempuan ke dalam desain proyek tanpa memperhatikan kesetaraan gender. Pendekatan yang hanya memasukkan kebutuhan salah satu pihak, perempuan atau laki-laki saja dalam pembangunan tanpa mempertimbangkan relasi gender, akan menimbulkan bias gender yang pada gilirannya menimbulkan isu kesenjangan gender. Konsep gender berbeda dengan emansipasi. Konsep gender merujuk kepada relasi perempuan dan laki-laki yang lebih harmonis, seimbang, dan menghargai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, melindungi, dan saling menghormati, dari berbagai aspek, baik secara personal, interpersonal, maupun profesional.

Mengintegrasikan gender dalam pembangunan merupakan kebutuhan untuk mendorong terwujudnya kualitas hidup manusia yang lebih baik. Hal ini menjadi kebijakan pemerintah Indonesia melalui INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG menurut INPRES tersebut merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan publik. PUG merupakan suatu pendekatan untuk mengembangkan kebijakan yang memasukkan pengalaman-pengalaman dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program dalam bidang-bidang politik, ekonomi, dan masyarakat. PUG bertujuan untuk memastikan perempuan dan laki-laki menikmati manfaat pembangunan secara adil dan merata. Penerapan PUG di berbagai bidang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan, sekaligus menjamin mutu kehidupan seluruh anggota masyarakat.



Melalui implementasi PUG dalam kebijakan atau program, keterlibatan laki-laki dan perempuan sudah dimulai saat menentukan tujuan program. Selanjutnya kedua belah pihak dapat terlibat dalam menganalisis data terpilah gender sebagai pembuka wawasan, menentukan langkah-langkah program, menyusun indikator sukses, melakukan monitoring dan evaluasi, serta upaya tindak lanjut kegiatan. Implementasi PUG memerlukan prasyarat penelusuran tentang kondisi awal serta komponen kunci PUG seperti tampak dalam Tabel 1.1 dibawah.

Tabel 1.1. Prasyarat Pengarusutamaan Gender

Kondisi awal	Komponen kunci PUG
Komitmen politik	Peraturan perundang-undangan
Kerangka kebijakan	Tindak lanjut atas ratifikasi, konvensi internasional, penyusunan sistem dan mekanisme akuntabilitas yang responsif gender, dan pelembagaan institusi PUG
Struktur dan mekanisme pemerintah	Unit PUG, <i>focal point</i> , pokja dan berbagai forum
Sumber daya	Sumber daya manusia dan sumber dana
Sistem informasi dan data	Data dan statistik yang terpilah menurut jenis kelamin
Alat analisis	Analisis gender
Masyarakat madani	Mekanisme dialog dan proses yang partisipatif

Sumber: INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional dan Panduan Pelaksanaannya

Pelaksanaan pembangunan yang responsif gender memerlukan tersedianya anggaran dan terciptanya infrastruktur birokrasi yang memungkinkan kebijakan ini secara mekanistik dapat diselenggarakan. Pemahaman tentang siklus manajemen dan intervensi program gender sangat penting agar kegiatan dapat berjalan benar. Terdapat tujuh tahap keterlibatan berbagai aktivitas pada siklus manajemen program yang berperspektif gender, dimulai dari identifikasi kebijakan, persiapan, sampai monitoring dan evaluasi kebijakan (Tabel 1.2).

Tabel 1.2. Siklus manajemen pembangunan gender dan intervensi kegiatan

No	Tahap	Intervensi Kegiatan
1	<b>Identifikasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arah kebijakan</li> <li>Identifikasi kebijakan perempuan di dalam pembangunan, dan gender dan pembangunan</li> <li>Target PUG</li> </ul>
2	<b>Persiapan</b> a. Definisi kelompok target b. Identifikasi tujuan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnosis gender</li> <li>Identifikasi peran gender</li> <li>Penilaian kebutuhan gender</li> </ul>
3	<b>Desain</b> a. Keterlibatan individu b. Studi kelayakan sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan gender pada staf</li> <li>Kerangka acuan responsif gender (staf dan konsultan)</li> <li>Mekanisme untuk menjamin terlibatnya organisasi sadar gender dalam proses perencanaan</li> <li>Data terpilah tentang alokasi dan kontrol sumber daya</li> </ul>
4	<b>Penilaian</b> a. Misi individu b. Studi penilaian desain kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerangka acuan konsultan responsif gender</li> <li>Keterlibatan ahli gender</li> <li>Pelatihan gender bagi pelaksana program</li> <li>Analisis biaya dan manfaat gender yang melibatkan perempuan dalam kegiatan tak terbayar</li> <li>Keterlibatan perempuan dalam pelatihan gender</li> </ul>
5	<b>Ratifikasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Entry point</i> untuk revisi kebijakan</li> <li>Pelatihan bagi pelaksana program tentang kesadaran gender</li> </ul>
6	<b>Implementasi</b> a. Dinas dan staf b. Populasi target	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan perencanaan gender bagi pelaksana program</li> <li>Kerangka acuan gender untuk pelaksana program</li> <li>Komposisi lembaga responsif gender</li> <li>Klarifikasi peran perempuan dalam proyek</li> </ul>

No	Tahap	Intervensi Kegiatan
7	<b>Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerangka acuan konsultan gender</li> <li>• Pelatihan gender bagi pelaksana program</li> <li>• Komposisi tim seimbang antara laki-laki dan perempuan</li> <li>• Upaya tindak lanjut</li> </ul>

Sumber: Moser(1993)

### 1.3. Imbal Jasa Lingkungan di Indonesia

ICRAF melalui Program RUPES yang disponsori IFAD telah memainkan peran penting dalam mempromosikan konsep imbal jasa lingkungan baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk non-tunai, seperti dukungan akses terhadap lahan dan sumber daya alam, pelatihan dan lainnya, yang bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan. RUPES sebagai sebuah uji coba telah dilaksanakan di Indonesia, Filipina, Cina, Vietnam, India dan Nepal.

Pada awal pengenalan konsep IJL, Wunder (2005) mendefinisikan skema IJL atau dengan istilah pembayaran jasa lingkungan atau PJJ (*payment for environmental services*) sebagai skema transaksi jasa lingkungan sukarela yang 'dibeli' oleh minimal (satu) pembeli jasa lingkungan dari minimal (satu) penyedia jasa lingkungan, jika dan hanya jika penyedia jasa lingkungan memenuhi persyaratan jual-beli jasa lingkungan tersebut (*conditionality*). Berbeda dengan konsep IJL, secara sederhana, skema PJJ merupakan upaya pemberian pembayaran yang biasanya diidentikkan secara tunai kepada pihak penyedia jasa lingkungan. Penyedia jasa melakukan pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam yang terukur berdasarkan kuantifikasi jasa lingkungan. PJJ pada dasarnya tidak mengutamakan pengentasan kemiskinan dalam pelaksanaan konsepnya tetapi lebih berfokus kepada peningkatan dan pelestarian jasa lingkungan secara efisien dan efektif.

Beragam pengalaman penerapan PJJ di berbagai wilayah baik di Asia maupun di Amerika Latin menunjukkan tidak banyak pihak yang menerapkan konsep PJJ secara murni seperti yang didefinisikan Wunder. Pada kenyataannya, tidaklah mudah untuk mengukur jasa lingkungan secara definitif terutama di negara berkembang.

Selain itu, pembayaran tunai dapat mengganggu tatanan sosial serta pengabaian faktor pengentasan kemiskinan sehingga skema PJJ tidak berkelanjutan (Leimona *et al.* 2009; van Noordwijk dan Leimona 2010). Selanjutnya, van Noordwijk dan Leimona (2010) merekomendasikan tiga paradigma baru dalam mendefinisikan PJJ, yaitu: (a) komodifikasi jasa lingkungan (*Commoditized Environmental Services* – COS) atau setara dengan konsep PJJ yang didefinisikan Wunder, (b) kompensasi terhadap pengabaian kesempatan (bagi penyedia jasa lingkungan untuk menerapkan pola pengelolaan lahan yang lebih menguntungkan) – *Compensation for Opportunities Skipped* (COS), dan (c) investasi dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan jasa lingkungan – *Co-Investment and Stewardship in Environmental Services* (CIS). Pemilahan paradigma ini berdasarkan pengalaman, analisis dan pembelajaran dari lokasi riset aksi RUPES tahap I, di mana terdapat variasi dalam pembentukan skema IJJ, termasuk penerapan konsep kondisional dari IJJ.

Pada tahun 2004, skema IJJ di Singkarak diarahkan untuk mengurangi emisi karbon melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism – CDM). Pada tahun 2008, IJJ di Singkarak tersebut berkembang menjadi skema Pasar Karbon Sukarela (PKS). Hal ini disebabkan skema PKS lebih memungkinkan diterapkan di Singkarak<sup>4</sup>. Skema IJJ di Singkarak dimulai dengan penetapan cakupan wilayah skema IJJ yang mungkin dapat dilaksanakan oleh petani. Setelah itu, dilakukan promosi untuk memperoleh sponsor program atau pembeli jasa lingkungan. Pada skema IJJ di Singkarak pembeli karbon adalah sebuah perusahaan swasta dari Belanda dengan perjanjian kesepakatan dilakukan melalui persetujuan kelompok petani, wali nagari, dan Yayasan Danau Singkarak. Implementasi PKS secara lebih intensif di Singkarak baru dimulai pada awal 2009, dan pendampingan kepada masyarakat peserta PKS dilakukan pada awal 2010.

Pengalaman IJJ di Sumberjaya dengan pengelolaan DAS bersama masyarakat menguji konsep PJJ murni dengan kuantifikasi pengurangan sedimentasi sebagai persyaratan kontrak antara penyedia dan pembeli jasa lingkungan. Kontrak IJJ dilakukan antara Kelompok Kali Bersih sebagai penyedia jasa lingkungan

---

4 <http://rupes.worldagroforestry.org/>



▲  
Pemenuhan ekonomi keluarga  
menjadi tanggung jawab  
perempuan dan laki-laki (foto:  
World Agroforestry Centre)

dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Way Besai sebagai pembeli jasa lingkungan, dengan imbalan berupa pembangkit listrik mikrohidro. Skema ini memperlihatkan pentingnya data dasar serta analisis hidrologi agar skema ini tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat penyedia jasa lingkungan (Pasha *et al.* 2010). Selain itu, diperkenalkan monitoring kualitas air bersama masyarakat sebagai salah satu alat negosiasi masyarakat penyedia dengan pembeli jasa lingkungan.

Pengelolaan lingkungan yang menjadi fokus kajian terkait skema IJL di Nusa Tenggara Barat adalah pengelolaan Hutan Sesaot. Fungsi dari kawasan Hutan Sesaot adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang berada di empat desa sekitarnya dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air baik untuk air minum maupun irigasi. Dinamika yang luar biasa terdapat beragam kepentingan para pemangku kepentingan, dan bermuara pada tarik menarik antara tujuan pelestarian hutan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Solusi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Hutan Sesaot nampaknya dapat ditemukan melalui pengintegrasian antara inisiatif partisipasi masyarakat lokal dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kehutanan daerah. Pengembangan IJL di Nusa Tenggara Barat adalah pengelolaan Hutan Sesaot melalui pola Hutan Kemasyarakatan (HKm). Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan lindung dengan persyaratan diatur oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1994, tentang Hutan Kemasyarakatan, dan dikukuhkan melalui SK Gubernur No.140/1996. Pada perkembangan selanjutnya di tahun 2009, skema IJL dikembangkan pada kelompok HKm yang difasilitasi oleh LSM Konsepsi dengan memperkenalkan konsep kelembagaan

BESTARI (Badan Pelestari Sumber Daya Mata Air Rinjani). Izin pengelolaan HKm baru diberikan pada sebagian kelompok tani pada lahan seluas 25 hektar saja. Kelompok tani lainnya masih dalam proses pengajuan izin HKm.

## 1.4. Fokus studi dan kerangka pendekatan

### 1.4.1. Fokus studi

Studi dilaksanakan mulai Juli sampai November 2010, membahas aspek gender dalam skema IJL dalam tiga aspek, yakni (i) Pertimbangan gender sebagai konstruksi sosial relasi perempuan dan laki-laki, termasuk isu ketimpangan gender dalam berbagai tahap pengembangan skema IJL; (ii) Partisipasi perempuan dalam manajemen dan pengambilan keputusan dalam skema IJL; dan (iii) Kebijakan IJL yang responsif gender.

Kegiatan dalam studi ini meliputi lima hal berikut: (i) Sintesis konsep gender dan pembangunan, ulasan kajian program RUPES terdahulu, dan analisis potensi dan kendala penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam skema IJL di Indonesia, (ii) Penelusuran data primer dan sekunder tentang skema IJL pada program RUPES di Singkarak (Sumatera Barat), Sumberjaya (Lampung), dan Sesaot (Nusa Tenggara Barat); (iii) Analisis gender tentang implementasi skema IJL di lokasi studi RUPES. Analisis gender yang dilakukan meliputi: analisis di tingkat rumah tangga terpilih di tiga lokasi, analisis pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender melalui telaah dari sisi peluang, partisipasi, evaluasi, dan manfaat skema IJL; (iv) Diskusi kelompok terfokus (*Focused Group Discussion-FGD*) dengan masyarakat penyedia jasa lingkungan, baik kelompok laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam skema IJL, dan pihak pemanfaat jasa lingkungan; dan (v) Perumusan alternatif strategi mengintegrasikan kebutuhan gender dalam skema IJL melalui penggunaan instrumen analisis *Gender Analysis Pathway/GAP*.

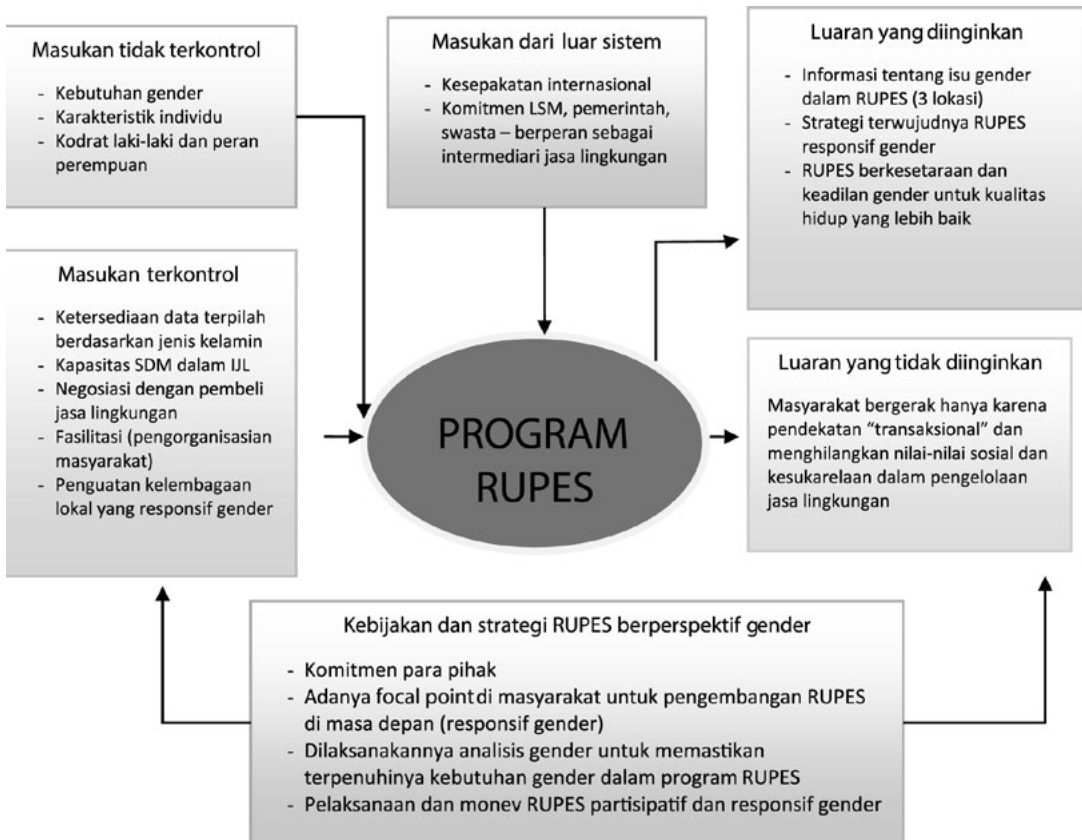
### 1.4.2. Kerangka pendekatan

*Rewards for Use of and Shared Investment in Pro Poor Environmental Services Schemes* (RUPES) dapat dilihat sebagai sebuah sistem. Upaya agar skema RUPES memberi manfaat

kepada laki-laki dan perempuan secara berkelanjutan memerlukan kebijakan dan strategi RUPES yang responsif gender. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan gagasan IJL ke depan yang lebih sensitif gender. Untuk itu, penelitian dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif didukung penilaian cepat (*rapid assessment*) tentang pandangan rumah tangga peserta IJL di lokasi studi.

Gambar 1.1 memperlihatkan kerangka pendekatan studi skema IJL berperspektif gender. RUPES terlaksana oleh adanya peran para pihak, terutama lembaga yang berkiphrah di bidang lingkungan untuk menggalang peran serta dan investasi masyarakat menjaga hutan, lahan, dan air dari kerusakan. Masyarakat menginvestasikan tenaga untuk memelihara lingkungan secara terorganisir. Mengingat kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap air bersih, listrik,

Gambar 1.1. Skema pendekatan RUPES berperspektif gender



dan energi masih melingkupi kehidupan masyarakat di kawasan lingkungan yang marjinal, melalui kiprah masyarakat dalam RUPES, masyarakat dapat mengadakan kontrak dengan pembeli jasling. Dalam kontrak, dapat disepakati peran dan tanggung jawab antara penyedia jasling, pembeli jasling, dan *reward* yang dapat diraih masyarakat.

Pelaksanaan program RUPES memerlukan masukan berupa data dan informasi tentang keterlibatan masyarakat dalam IJL yang lebih lengkap, baik dari sisi usia, jenis kelamin, posisi dan peran dalam skema IJL, dan kebutuhan gender, peran organisasi, kontrak dengan pembeli jasling, dan kemanfaatan. Di sisi lain, ketika skema IJL memperhatikan dan memasukkan aspirasi laki-laki dan perempuan, kemanfaatan skema IJL dapat dirasakan secara berimbang. Untuk mendorong skema IJL yang lebih sensitif gender, dibutuhkan dukungan berupa masukan yang dapat dikelola oleh manajemen RUPES.

Akan tetapi, kebijakan dan strategi tersebut memerlukan dukungan berupa masukan yang dapat dikelola oleh manajemen program RUPES. Masukan yang sulit dikontrol seperti kebutuhan gender, karakteristik individu, dan kodrat laki-laki dan peran perempuan perlu dipertimbangkan dalam merancang kebijakan dan strategi program RUPES.

## **1.5. Pelaksanaan studi**

Studi tentang telaah aspek gender dalam skema IJL di Indonesia ini dilaksanakan di Propinsi Sumatera Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Responden survei penilaian tentang pandangan masyarakat tentang gender dan pelaksanaan program skema IJL merupakan rumah tangga peserta program skema IJL (Tabel 1.3). Wawancara selama survei dilakukan kepada laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.



Tabel 1.3. Responden di tiga lokasi

Wilayah Studi	Populasi Rumah Tangga (RT) Peserta	Responden RT*
Singkarak	78	33
Lampung	50	20
Lombok	150	60
Total	278	113

\* Setiap rumah tangga masing-masing diwakili oleh satu orang perempuan dan laki-laki

Studi berupaya mendekati persoalan dari pola interaksi perempuan dan laki-laki di sektor domestik dan publik. Ranah domestik berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan dalam urusan rumah tangga, sedangkan ranah publik meliputi usaha-usaha produktif dan sosial. Gambar 1.2 di bawah menampilkan tahapan pelaksanaan studi.



Gambar 1.2. Alur pelaksanaan studi

### 1.5.1. Tahap pemahaman kondisi umum masyarakat

Tahap ini merupakan dasar dan latar belakang studi. Data yang diambil meliputi kondisi geografi umum termasuk penggunaan lahan di setiap lokasi, karakteristik demografi, kondisi sosio-ekonomi masyarakat, seperti latar belakang sosial budaya, mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan rumah tangga, dan kelembagaan lokal. Selain itu, kondisi bentang lahan lokasi studi diuraikan dalam

bentuk transek bentang lahan hulu-hilir. Metode yang dipakai dalam tahap ini adalah penelusuran data sekunder dari kantor desa, laporan pelaksanaan skema IJL di tiga lokasi, dan dari hasil penelitian yang relevan, serta pengambilan data primer melalui survei rumah tangga dan kelompok diskusi terfokus. Sedangkan kondisi bentang lahan direkam melalui kegiatan *transect walks*, yaitu berjalan menyusuri bentangan bentang lahan disertai dengan interview dengan masyarakat yang terkait dengan kondisi bentang lahan tersebut. Dalam diskusi di setiap titik bentang lahan, dibahas isu yang terkait dengan pengelolaan alam dan peran setiap pihak yang terkait, baik perempuan maupun laki-laki, serta penyebab dan alternatif solusi.

### 1.5.2. Tahap pemetaan dan analisis gender

Beberapa variabel yang berhubungan dengan peran dan relasi gender diidentifikasi menggunakan kerangka analisis gender Harvard (March, Smyth, and Mukhopadhyay 1999). Analisis Harvard dilaksanakan untuk mengetahui profil akses dan kontrol serta pengambil keputusan dalam kegiatan domestik dan publik, terutama dalam skala rumah tangga. Isu-isu gender diskusikan dan dipetakan sesuai lokasi. Isu-isu tersebut dapat dikategorikan sebagai isu subordinasi, marginalisasi, stereotipi, dan ketimpangan gender dalam hal akses, peran, kontrol, dan manfaat. Analisis Moser berangkat dari hak-hak perempuan dan laki-laki dari sisi pemenuhan kebutuhan gender praktis dan strategis yang bertujuan untuk melihat kemiskinan dan ketertinggalan perempuan dalam program-program pembangunan. Pada tahap ini dilaksanakan survei dengan pendekatan penilaian cepat (*rapid assesment*).

Analisis gender digunakan untuk mengetahui peran laki-laki dan perempuan dalam skema IJL dan mengidentifikasi pihak yang memiliki kekuasaan (*power*) atas sumber daya dan pengambil keputusan. Kerangka Moser mencakup konsep tiga peran yaitu peran produktif, reproduktif, dan sosial atau komunitas. Analisis gender tersebut mempermudah peneliti memperoleh gambaran tentang kesenjangan gender yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam skema IJL. Pendekatan dan teknik perolehan data primer untuk analisis gender adalah wawancara dengan menggunakan

kuesioner, pengamatan, wawancara mendalam dengan informan serta diskusi kelompok berfokus (FGD). Diskusi kelompok berfokus bertujuan untuk (a) Mengetahui tingkat kesadaran gender dari masyarakat partisipan skema IJL; (b) Memperoleh gambaran tentang pandangan masyarakat akan peran gender, kapasitas kelompok masyarakat dalam negosiasi, dan tingkat pemenuhan kebutuhan gender praktis dan strategis.

### 1.5.3. Tahap analisis kebijakan berperspektif gender

Tahap ini menggunakan metode analisis *Gender Analytical Pathway/* GAP (BAPPENAS 2001) yang dilakukan melalui suatu lokakarya. Lokakarya bertujuan menghasilkan kerangka kerja pengembangan RUPES yang berperspektif gender. Dalam menjamin keberlanjutan IJL oleh masyarakat, sangat diharapkan seluruh pihak memahami upaya pemenuhan kebutuhan gender, baik kebutuhan gender praktis maupun strategis. Analisis GAP merupakan analisis yang dikembangkan oleh BAPPENAS untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender dalam perancangan kebijakan, program, proyek dan/atau kegiatan pembangunan dengan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Terdapat delapan langkah dalam GAP yang perlu dilalui untuk dapat melaksanakan analisis gender sebelum merekomendasikan hasil yang diinginkan. GAP dapat digunakan menganalisis dan menyusun kriteria tentang skema IJL berperspektif gender. Alur kerja berupa matriks dalam setiap tahapan analisis dalam bentuk lembar kerja. Lembar kerja tersebut diisi dan dilengkapi berdasarkan data dan fakta yang ada di masing-masing lokasi kajian.

### 1.5.4. Data dan analisis data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi kepala rumah tangga peserta IJL, informan, dan partisipan diskusi kelompok berfokus. Data primer yang dikumpulkan meliputi (i) Kondisi sosial ekonomi rumah tangga; (ii) Pemetaan *transect walk* dan peran gender; (iii) Aktivitas masyarakat; dan (iv) Isu gender dalam IJL. Sumber sekunder terdiri atas lembaga pemerintah yakni Kementerian Kehutanan,

dinas kehutanan, perguruan tinggi, perusahaan daerah dan lembaga daerah lain, lembaga penelitian, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Informan terdiri atas tokoh masyarakat, aktivis perempuan, dan fasilitator skema PES. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi profil lokasi dan skema IJL dalam proyek RUPES, kebijakan dan strategi pembangunan untuk pemulihan sumber daya alam (hutan dan air), serta program pemberdayaan masyarakat di tiga lokasi.

#### 1.5.5. Analisis data

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, data hasil survei diolah menggunakan SPSS versi 15 untuk melihat sebaran, kecenderungan, dan kondisi terkini dari masyarakat penyedia jasa lingkungan di tiap lokasi. Secara kualitatif, data dianalisis menggunakan kerangka analisis gender menurut Harvard, Moser, dan *Gender Analytical Pathway* (GAP), seperti telah disebutkan dalam uraian sebelumnya. Analisis gender dapat menggambarkan relasi perempuan dan laki-laki dalam skema IJL. Konfirmatori atas hasil analisis gender, dilaksanakan melalui triangulasi.



# Bab 2

## Profil komunitas di tiga lokasi studi IJL

Siti Amanah, Defina, Titi Sumarti, Agustina M. Purnomo, Ninuk Purnaningsih, Agus Purbatin Hadi, Rachman Pasha, Nani Saptariani

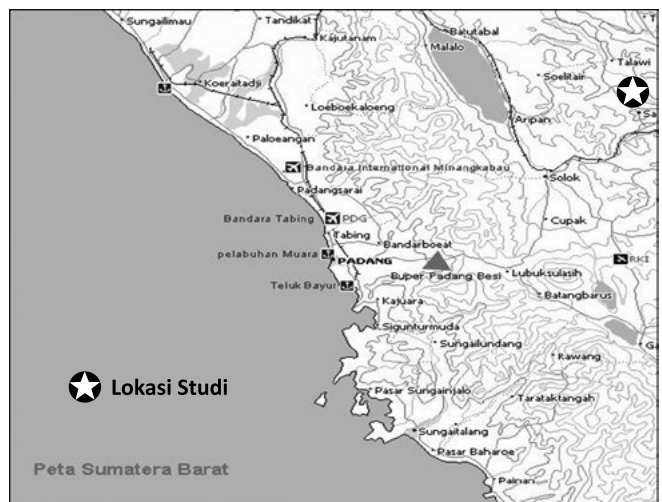
### 2.1. Kondisi umum lokasi

Studi gender di Sumatera Barat dilaksanakan di lokasi proyek Pasar Karbon Sukarela yang berada di sekitar Danau Singkarak, yaitu tepatnya di Nagari Paninggahan (Gambar 2.1). Lokasi skema IJL Pasar Karbon Sukarela meliputi areal kelola Bukit Labi, Bukit Tambang Manyiak, Bukit Panjang, dan Bukit Talago Indah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22/1999 juncto Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Propinsi Sumatera Barat mencanangkan pemerintahan berbasis nagari. Secara administratif, Nagari Paninggahan terletak di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat. Kecamatan Junjung Sirih memiliki dua wilayah pemerintahan terkecil yang dikenal dengan nagari (setara dengan kelurahan), yaitu: Nagari Paninggahan dan Nagari Muaro Pingai. Nagari

Paninggahan terdiri atas enam jorong (dusun), yaitu: Subarang, Parumahan, Gantiang, Koto Baru, Kampuang Tengah, dan Gando. Nagari Paninggahan terletak pada 0.31 derajat-45 derajat LS dan 100.25-101.41 derajat LS dan 100.25-101.41 Bujur Timur, berada pada ketinggian 400-600 mdpl. Suhu rata-rata di Nagari Paninggahan berkisar 24°C - 25.4°C dengan curah hujan 1.600 mm - 1.650 mm per tahun.

Gambar 2.1. Peta lokasi studi di Singkarak, Sumatera Barat





Nagari Paninggahan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar di Bagian Utara, dengan Nagari Muaro Pingai di Bagian Selatan, dengan

Danau Singkarak di Bagian Timur, dan dengan Lubuk Minturun, Kota Padang di Bagian Barat. Nagari Paninggahan terletak 1,5 km dari ibu kota kecamatan, 43 km dari ibu kota kabupaten, dan sekitar 81 km dari Kota Padang. Keadaan alam Nagari Paninggahan cukup beragam, diantaranya terdapat dataran rendah meliputi luasan 5.045 hektar, berbukit-bukit seluas 782 hektar, dan bergelombang seluas 4.413 hektar (Gambar 2.2).

Nagari Paninggahan mempunyai beberapa anak sungai dan mata air yang bermuara ke Danau Singkarak. Selain menjadi sumber air irigasi, sungai-sungai tersebut juga merupakan objek wisata. Kawasan hutan merupakan wilayah terluas di Nagari Paninggahan, disusul oleh tegalan dan lahan kering (Tabel 2.1). Kawasan nagari ini juga memiliki perairan umum berupa danau dan kolam ikan.

Tabel 2.1. Penggunaan lahan di Nagari Paninggahan 2009

No	Jenis Penggunaan Lahan	Hektar	%
1	Sawah	606	5,91
2	Kampung/Perkarangan/Halaman	405,7	3,96
3	Tegalan/Kebun	1.956,3	19,09
4	Lahan Kering	965	19,09
	Ladang Huma	62	
	Pengembalaan/ Padang rumput	903	
5	Hutan	3.848	37,54
	Hutan Rakyat	1.659	
	Hutan Negara	2.189	
6	Perkebunan	1.098	10,71
7	Lahan Basah	1.371	13,38
	Perairan Umum	1.356	
	Tambak/Kolam/Empang	15	
<b>Jumlah</b>		<b>10.250</b>	<b>100</b>

Sumber: Kantor Wali Nagari Paninggahan (2010)

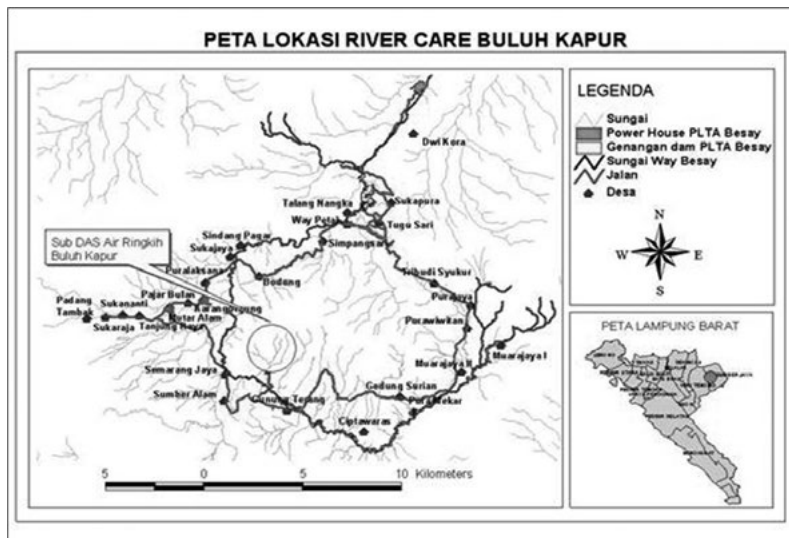
▲  
Bentang alam berbukit di Nagari Paninggahan

Studi gender di Lampung dilaksanakan di lokasi program Peduli Sungai/*Rivercare* yang terfokus di Dusun Buluh Kapur yang secara administratif merupakan bagian dari Desa Gunung Terang, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Propinsi Lampung (Gambar 2.3). Secara geografis, Dusun Buluh Kapur berbatasan langsung dengan hutan lindung Register 45B di Bagian Utara, dengan Desa Semarang Jaya di Bagian Barat, dengan Desa Rigis Jaya II di Bagian Timur, dan di Bagian Selatan berbatasan dengan Dusun Bedeng Sari. Bila dilihat dari keterjangkauan, jalan Dusun Buluh Kapur merupakan daerah yang cukup terpencil. Untuk mencapai dusun tersebut diperlukan waktu tempuh sekitar 5 jam dari Bandar Lampung, yaitu menggunakan kendaraan roda empat selama 4 jam menuju Sumberjaya, dilanjutkan dengan motor selama 1 – 1,5 jam melewati jalan setapak dengan kondisi memprihatinkan.

Lahan di Dusun Buluh Kapur didominasi oleh kebun kopi dan sisanya merupakan areal persawahan dan pemukiman. Kebun kopi tua banyak dijumpai di lereng bagian bawah dan kebun kopi muda (umur  $\pm$  10 tahun) di lereng bagian atas. Praktik pengelolaan kebun dengan teknik konservasi yang disyaratkan dalam skema IJL masih jarang ditemukan, namun bentuk pengelolaan kebun campuran telah ada.

Terdapat dua tipe status lahan di Dusun Buluh Kapur, yakni lahan milik atau dikenal dengan istilah lahan marga, dan lahan negara yang merupakan kawasan hutan lindung. Pada kawasan hutan lindung, sebagian besar wilayah Dusun Buluh Kapur termasuk ke dalam wilayah Register 45B, yang berarti masyarakat dapat mengelola lahan melalui Sistem Hutan Kemasyarakatan (HKM). Lahan marga merupakan lahan milik penduduk lokal atau penduduk pendatang

Gambar 2.2. Peta situasi Dusun Buluh Kapur (ICRAF, 2008)





yang membuka lahan pada masa-masa awal pembukaan hutan menjadi lahan pemukiman dan pertanian. Lahan marga dapat berubah kepemilikan melalui pewarisan maupun melalui jual beli. Lahan HKm di Dusun Buluh Kapur terdiri dari 4 sub kelompok yang memiliki 107 anggota dan terdiri dari 216,84 Ha lahan budidaya dan 71,31 Ha lahan perlindungan. Akses lahan HKm terikat dalam perjanjian antara kelompok dengan Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat dan diketahui peratin (kepala desa) Desa Gunung Terang. Akses lahan ini hanya meliputi akses lahan untuk budidaya, tidak untuk pemukiman dan tidak bisa dialihkan pada orang lain.

Studi gender di Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di lokasi kegiatan kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) yaitu di Desa Sesaot. Desa tersebut merupakan salah satu dari empat desa yang ada di sekitar kawasan hutan Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan luas wilayah 2.722,23 Ha. Desa ini terletak di ujung timur wilayah Kecamatan Narmada dengan batas Desa Batu Kumbang (sebelah utara), Hutan Lindung Sesaot (sebelah timur), Desa Sedau (sebelah selatan), Desa Selat (sebelah Barat). Secara geografis wilayah Desa Sesaot memiliki ketinggian antara 300-500 mdpl. Daerah tertinggi terletak di Kampung Kumbi, Dusun Jurang Malang, yakni dengan ketinggian 500 mdpl dan terendah berkisar 300 mdpl yaitu di wilayah Dusun Pembuwun (Monografi Desa Sesaot, 2010). Jarak dari desa Sesaot ke ibukota kecamatan ± sepanjang 9 km, dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat dengan waktu tempuh 30 menit. Jarak dari ibukota kabupaten ke desa Sesaot mencapai ± 30 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.

Berdasarkan karakteristik lahan, Desa Sesaot memiliki pH tanah antara 5,6 – 6,7 dengan kemiringan lahan 8 %. Curah hujan 8.813 mm/tahun, dengan 7 bulan basah dan 5 bulan kering, dengan kondisi drainase baik. Luas lahan persawahan yang ada meliputi 63,675 Ha sawah irigasi teknis yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 82,325 Ha sawah irigasi rakyat. Sumberdaya air yang dimiliki mencakup 110 buah sumur gali, 41 buah mata air, dan 2 sungai (Monografi Desa Sesaot, 2010).

Kawasan Hutan Lindung Sesaot seluas 3.670 Ha berlokasi di bagian barat kompleks Taman Nasional Gunung Rinjani terletak antara

8°15' – 8°35'  
 Lintang Selatan  
 dan antara 116°03'  
 – 116°44' Bujur  
 Timur. Lokasi  
 tersebut berada  
 pada ketinggian  
 500 – 650 meter  
 dari permukaan



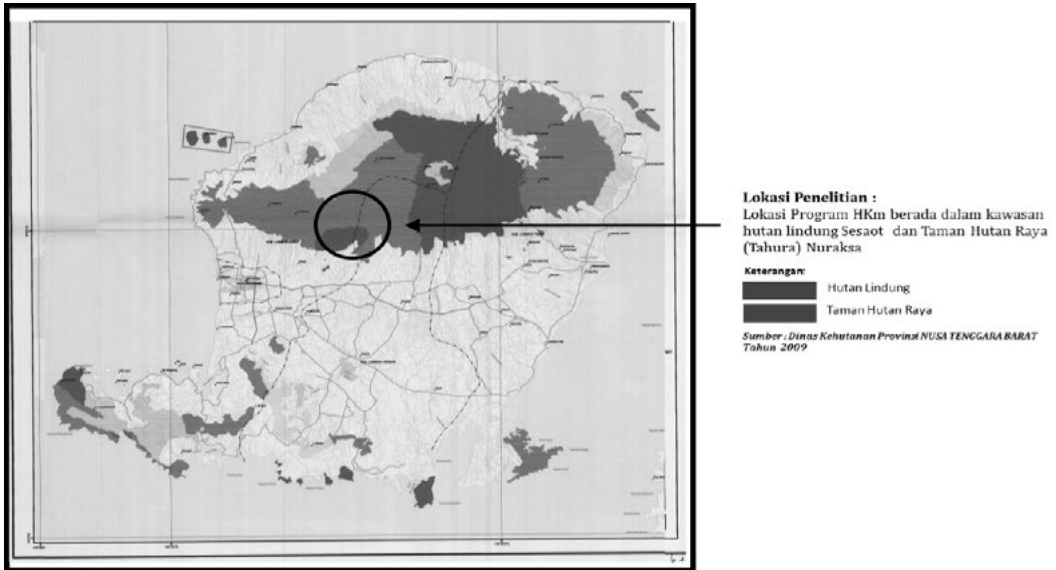
laut dan memiliki topografi kawasan mulai datar hingga berbukit dengan curah hujan rata-rata 156 mm/tahun. Secara administratif, kawasan hutan lindung Sesaot berada di empat (4) desa yakni Desa Sesaot, Desa Lembah Sempaga, dan Desa Sedau (ketiganya masuk dalam wilayah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat), serta Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Dinas Kehutanan Prov Nusa Tenggara Barat, 2009).



(Ki-Ka): Potensi mata air Aik Nyet di kawasan hutan Sesaot dan pintu gerbang Taman Hutan Raya Sesaot yang menjadi sumber konflik Pesanggem HKm dengan Dinas Kehutanan. (foto: tim penulis)

Vegetasi hutan Sesaot mencirikan hutan tropis dataran rendah yang memiliki berbagai jenis flora dan fauna. Tipe vegetasi berupa vegetasi hutan tanaman dan vegetasi hutan alam. Vegetasi hutan tanaman terdiri dari beberapa jenis kayu seperti oleh mahoni (*Swetinia mahagoni*), sengon (*Paraserianthes falcataria*), kemiri (*Aleurites moluccana*) dan tanaman MPTS seperti kopi (*Coffea arabica*), rambutan (*Nephellium lappacium*), manggis (*Garcinia mangostana*), nangka (*Artocarpus integra*) dan durian (*Durio zybeticus*). Vegetasi hutan alam antara lain buah oda (*Palaquium poetida*), bajur (*Pteospermum javanicum*), klokos (*Eugenia Spp*), Laban (*Vitex pubescens vhal*), kesambi (*Seleichera oleosa*), dau (*Dracontomelon mangiferrum*), terep (*Artocarpus elasticus*), sono (*Dalbergia sp*), nyamplung (*Calophyllum inophyllum*), tandan sesaot (*Mallotus philipinensis*), putat (*Palconia valida*), tanjung (*Mimosop elengi*), beringin (*Ficus Indicus*), ketimus (*Protium javanicum burn*) dan lain-lain. Sedangkan jenis satwa antara lain biawak (*Varanus salvator*), ayam hutan (*Gallus specdiv*), kera (*Macaca Sp*), babi hutan (*Sus vittatus*), dan berbagai jenis burung dan berbagai jenis ular (Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2009).

Sementara jenis-jenis tanaman yang berasal dari program reboisasi meliputi mahoni (*Swetinia mahagoni*), sengon (*Albazia Falcataria*), dan sonokeling (*Dalbergialatifolia Roxb*). Luas kawasan yang



Gambar 2.3. Peta kawasan Hutan Sesaot

bervegetasi dari jenis tanaman ini mencapai 1.119 ha, diantaranya terdapat mahoni yang ditanam antara tahun 1956 – 1980. Sisanya merupakan hutan alam yang ditumbuhi oleh jenis-jenis kayu lokal. Di sela tanaman mahoni dan sengon, masyarakat sejak tahun 1960-an telah menanam tanaman kopi. Mulai beberapa tahun yang lalu, masyarakat diperkenankan menanam jenis tanaman seperti vanili, nangka dan beberapa pohon durian. Dengan demikian, masyarakat sejak tahun 1960-an telah memiliki akses untuk masuk dan mengelola tanaman yang terdapat di bawah tegakan mahoni.

Arti penting kawasan ini sesungguhnya tidak saja bagi kehidupan ekonomi masyarakat yang berada di empat desa yang mengitarinya, namun juga bagi kelestarian lingkungan. Kawasan hutan Sesaot merupakan daerah tangkapan air baik untuk air minum maupun untuk air irigasi. Terdapat kurang lebih 44 mata air di hutan tersebut yang kemudian mengalir ke beberapa sungai (Kali Jangkok, Eat Kumbi, Kali Tembiras, Kali Sesaot, Kali Betuang dan Kali Binsuwe). Beberapa mata air yang memiliki debit air yang besar antara lain: Ranget, Pengkukun, Sesaot, Aik Nyet, Pengkoak dan Orong Petung. Pada tahun 1985, dibangun sebuah bendungan yang berfungsi menampung dan mengarahkan air yang berasal dari Hutan Sesaot menuju ke wilayah persawahan yang terdapat di Lombok Tengah. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan produksi padi dengan mengubah jalur aliran air agar dapat lebih dioptimalkan.

## 2.2. Karakteristik demografi

Aspek demografi tingkat rumah tangga yang dilihat dalam studi ini meliputi usia responden, pendidikan, rataan jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan utama, dan pengalaman sebagai petani. Survei dalam studi menunjukkan bahwa mayoritas responden peserta skema IJL berusia produktif. Rataan usia kepala keluarga dan istri yang paling muda berada di Sumberjaya (35 tahun) dan yang paling tua berada di Sesaot (47 tahun) seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2. Dengan rentang usia yang relatif produktif ini, skema IJL di lokasi studi cukup memiliki prosepek untuk mendorong aspek ekonomi dan sosial masyarakat.

Dari sisi tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa rata-rata pendidikan istri masih relatif lebih rendah daripada rata-rata pendidikan suami. Responden yang berada di Singkarak relatif memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dua lokasi studi lainnya. Responden di Singkarak juga memiliki rata-rata jumlah tanggungan keluarga lebih banyak daripada dua lokasi studi lainnya.

Secara umum, terdapat kesamaan yang ditemui dari ketiga lokasi studi pada sektor mata pencaharian utama responden, yaitu sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa lebih dari 80% responden memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Sedangkan untuk pekerjaan sampingan, data yang dihasilkan cukup beragam dimana responden di Singkarak dan Sumberjaya memiliki mata pencaharian sampingan dari sektor pertanian, sedangkan responden di Sesaot cenderung memiliki pekerjaan sampingan diluar sektor pertanian, seperti buruh bangunan, pengrajin serta pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di ketiga lokasi studi memang merupakan masyarakat yang relatif miskin dimana mereka sangat menggantungkan hidupnya dari sumberdaya alam yang dimiliki. Sebagaimana diketahui, sektor pertanian memiliki tantangan dengan kondisi alam yang berubah-ubah, risiko, dan fluktuasi harga komoditas sehingga cenderung menempatkan petani dalam kondisi ketidakpastian akan hasil alam mereka.

Tabel 2.2. Demografi di tiga wilayah studi

No.	Karakteristik demografi	Singkarak	Sumberjaya	Sesaot
<b>Rataan umur (tahun)</b>				
1	Suami	47	42	51
	Isteri	43	35	47
<b>Pendidikan (tahun)</b>				
Kepala keluarga (%)				
2a	SD/Madrasah tidak tamat	0	20	80
	SD/Madrasah tamat atau SLTP/Tsanawiyah tidak tamat	33	30	10
	SLTP /Tsanawiyah tak tamat atau SMA/Aliyah tak tamat	27	20	0
	SLTA/Aliyah	40	0	10
	Perguruan Tinggi	0	0	0
<b>Isteri (%)</b>				
2b	SD/Madrasah tidak tamat	17	20	94
	SD/Madrasah tamat atau SMP/Tsanawiyah tak tamat	17	20	3
	SMP/Tsanawiyah tak tamat atau SMA/Aliyah tak tamat	22	30	3
	SMA/Aliyah atau pernah di Perguruan Tinggi	44	10	3
	Perguruan Tinggi	0	20	0
3	<b>Rataan jumlah tanggungan keluarga (jiwa)</b>	6	3	2
<b>Pekerjaan utama KK (%)</b>				
4a	- Pertanian	80	100	82
	- Non pertanian	20	0	18
<b>Pekerjaan sampingan KK (%)</b>				
4b	- Pertanian	47	65	12
	- Non pertanian	33	35	43
	- Tidak ada	20	0	45

Data kependudukan yang diperoleh selama studi (Tabel 2.3) menunjukkan bahwa populasi penduduk terbesar dari ketiga wilayah studi adalah di Singkarak (Nagari Panninggahan) dengan penduduk berjumlah 12.515 jiwa. Populasi perempuan lebih banyak yakni 6.622 jiwa (52,91%), sedangkan laki-laki sebanyak

5.893 jiwa (47,09%). Populasi penduduk di Sesaot mencapai 7.884 jiwa, dengan proporsi penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang yakni 3.952 jiwa (50,13%), sedangkan laki-laki sebanyak 3.932 jiwa (49,87%). Wilayah Sumberjaya merupakan lokasi studi dengan populasi penduduk yang terendah. Dusun Buluh Kapur yang merupakan bagian dari Desa Gunung Terang, hanya memiliki populasi penduduk sebesar 2.127 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan, yakni sebanyak 1.262 jiwa (51,3%) sedangkan perempuan sebanyak 1.200 jiwa (48,7%).

Tabel 2.3. Perbandingan jumlah penduduk di tiga lokasi studi

<b>Penduduk (jiwa)</b>	<b>Singkarak</b>	<b>Sumberjaya</b>	<b>Sesaot</b>
Laki- laki	5.893	1.262	3. 932
Perempuan	6.622	1.200	3. 952
<b>Jumlah</b>	<b>12.515</b>	<b>2.462</b>	<b>7. 884</b>

Sumber: *Profil desa pada setiap lokasi studi*

Kondisi sarana dan prasarana di tiga lokasi studi cukup beragam. Singkarak merupakan wilayah yang memiliki kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana yang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan ketersediaan infrastruktur fisik yang sangat memadai dimana salah satunya adalah keberadaan jalan desa yang sudah diaspal beton sehingga akses dari dan menuju Paninggahan dari ibukota kabupaten sangat lancar dan mudah. Selain itu keberadaan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, sarana olah raga, koperasi sangat mudah ditemui di berbagai lokasi. Berbeda dengan Singkarak, kondisi sarana dan prasarana di wilayah studi di Sumberjaya masih sangat terbatas. Kondisi jalan sebagian besar masih berupa tanah dan tidak ada penerangan listrik. Selain itu, sarana pendidikan yang tersedia hanyalah sebuah Sekolah Dasar yang berada di Pekon Gunung Terang dengan jarak sekitar enam kilometer dari Dusun Buluh Kapur. Tidak ada sarana kesehatan di Dusun Buluh Kapur. Sarana kesehatan terdekat adalah Bidan Desa di Pekon Rgis Jaya dan Pekon Gunung Terang. Di Sesaot, lokasi IJL mencirikan suasana perdesaan dengan kondisi hutan masih alami.

## 2.3. Kondisi sosial ekonomi

### 2.3.1. Sosial budaya

Suku masyarakat Nagari Paninggahan pada umumnya adalah Minangkabau asli dengan tipe masyarakat perantau yang memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Mayoritas lulusan SLTP dan SLTA akan keluar dari nagari, baik untuk melanjutkan sekolahnya maupun pergi berdagang di daerah rantau. Masyarakat di nagari ini sangat kuat dalam menerapkan adat istiadat Minangkabau pada hampir seluruh sendi kehidupan, termasuk dalam sistem penguasaan tanah dan pola kerjasama antar Nagari di selingkar Danau Singkarak. Selain itu, dalam menjalankan aturan adat setempat, masyarakat juga menerapkan sanksi adat berupa denda maupun hukuman adat, bila ada anggota masyarakat yang melanggar aturan adat tersebut. Berbeda dengan masyarakat di Paninggahan, mayoritas masyarakat di dusun Buluh Kapur merupakan para transmigran dengan mayoritas penduduk berasal dari Pulau Jawa. Sebagian besar berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dan hanya sedikit yang berasal dari Jawa Barat. Sehingga dalam kesehariannya, budaya Jawa sangat kental terasa dalam pola kehidupan masyarakat Buluh Kapur. Sedangkan di Desa Sesaot sebagian besar (95 %) penduduknya berasal dari Suku Sasak yang beragama Islam, dan sebagian kecil etnis Bali yang beragama Hindu.

### 2.3.2. Mata pencaharian

Bertani tanaman keras merupakan mata pencaharian utama masyarakat di Paninggahan. Beberapa komoditi yang dikembangkan adalah cengkeh, kemiri, kopi dan kelapa. Pada umumnya pertanian dilakukan pada lahan-lahan masyarakat yang berada di sekitar hutan lindung. Beberapa usaha sampingan yang dilakukan adalah pengembangan industri rumah tangga, berdagang, nelayan, jasa ojek dan sebagainya. Sama halnya dengan masyarakat di Paninggahan, mata pencaharian utama masyarakat di dusun Buluh Kapur juga berasal dari pertanian tanaman keras dengan komoditi utama adalah kopi robusta. Pola tanam yang bersandar pada satu jenis tanaman utama ini berpengaruh pada pola nafkah mereka yang bisa dikatakan sebagai pola nafkah tunggal. Lebih dari 96%

pendapatan rumah tangga berasal dari penjualan kopi. Tanaman lain ditanam hanya sebagai tanaman pelengkap dengan hasil kurang dari 4% pendapatan rumah tangga. Beberapa usaha sampingan yang dilakukan diantaranya adalah sebagai buruh bangunan, buruh tani, serta berdagang dengan skala mikro. Sedikit berbeda dengan dua lokasi sebelumnya, mata pencaharian utama masyarakat di Desa Sesaot tidak hanya terfokus pada pertanian tanaman keras akan tetapi juga dari tanaman buah, dengan komoditi utama adalah tanaman kopi, nangka, durian, pisang. Selain itu, sumber pendapatan masyarakat Sesaot berasal dari pengolahan hasil hutan (industri rumah tangga), seperti pembuatan dodol nangka dan rengginang ubi kayu. Sumber pendapatan dari pengolahan hasil hutan ini merupakan kontribusi nyata perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Hanya beberapa responden saja yang bermata pencaharian sebagai pedagang.

### 2.3.3. Tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga

Pendapatan rumah tangga pada ketiga wilayah studi secara garis besar bersumber dari sektor pertanian dan non pertanian (Tabel 2.4). Pendapatan terbesar terdapat pada petani di daerah Singkarak, disusul Sumberjaya, dan terakhir daerah Sesaot.

Tabel 2.4. Pendapatan rumah tangga menurut sumbernya (Rp/kapita/tahun)

Sumber pendapatan	Pendapatan (Rp/kapita/tahun)		
	Singkarak	Sumberjaya	Sesaot
Pertanian	37.367.878	20.873.362	12.567.323
Non Pertanian	48.343.969	835.400	27.182.990
Total per tahun	85.711.847	21.708.762	39.750.313

Pendapatan rumah tangga di Nagari Paninggahan berkisar Rp 85, 71 juta per tahun. Sektor pertanian menyumbang 44 % dari total pendapatan sedangkan 56% berasal dari sektor non-pertanian. Pengeluaran rumah tangga responden dibedakan menjadi pengeluaran pertanian dan pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran pertanian dihitung berdasarkan akumulasi pengeluaran per kelompok. Petani di Singkarak umumnya memiliki sumber pendapatan lain selain usaha tani tanaman tahunan. Sebagai pekerjaan sampingan, mereka juga bekerja



sebagai nelayan di Danau Singkarak. Ikan hasil tangkapan adalah ikan bilih (*Mystacoleuseus padangensis*) yang merupakan spesies endemik di Danau Singkarak. Dengan membanding pendapatan dan pengeluaran, tampak bahwa komponen pengeluaran rumah tangga lebih besar dari pada pendapatan. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran tidak tetap yang sangat besar. Komponen pengeluaran tidak tetap tersebut terdiri atas pembelian sarana dan prasarana produksi pertanian, pembayaran tenaga kerja (buruh tani), transportasi dan logistik dalam usaha pertanian.

Pendapatan rata-rata rumah tangga masyarakat di Dusun Buluh Kapur adalah Rp 20.873.362,- per tahun dengan kisaran antara Rp. 4.050.000,- hingga Rp. 61.200.000,-. Pendapatan tertinggi mencapai Rp. 61.200.000,- yang mana nilai ini hanya mampu diperoleh oleh seorang tuan tanah, sedangkan rata-rata responden lain hanya mendapatkan Rp. 18.520.847,- per tahun. Komposisi pendapatan terbesar berasal dari kopi yang meliputi 96% dari seluruh pendapatan responden. Pendapatan ini cukup memadai jika ditinjau dari pengeluaran rumah tangga mereka yang rata-rata berkisar antara Rp. 19.289.198,- sampai dengan Rp. 19.949.051,- per tahun.

Rata-rata pendapatan rumah tangga masyarakat di Desa Sesaot setiap tahunnya adalah sebesar Rp 12.567.323. Pendapatan usaha tani terendah adalah sebesar Rp 44.000.000- per tahun, dan pendapatan usaha tani tertinggi adalah sebesar Rp 49.300.000,- per tahun. Sumber pendapatan dari pengolahan hasil hutan (industri rumah tangga), seperti pembuatan dodol nangka dan rengginang ubi kayu, adalah sebesar Rp 27.182.990,- per tahun. Sumber pendapatan dari pengolahan hasil hutan ini merupakan kontribusi nyata perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Total pendapatan menjadi tinggi karena ada 2 orang responden (suami-istri) yang menyatakan berpendapatan Rp 440.124.000 per tahun dari hasil berdagang.

Pengeluaran rumah tangga di tiga wilayah studi secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu untuk sektor pertanian dan luar sektor pertanian (Tabel 2.5). Pengeluaran untuk pertanian relatif kecil karena petani tidak menggunakan pupuk dan obat-obatan serta peralatan dan mesin pertanian (alsintan) dalam pengolahan lahan.

Tabel 2.5. Rata-rata pengeluaran pertanian dan pengeluaran rumah tangga

Jenis pengeluaran	Jumlah pengeluaran (Rp/Kapita/Tahun)		
	Singkarak	Sumberjaya	Sesaot
<b>Pengeluaran pertanian</b>			
- Pengeluaran tetap	Tidak tersedia data	2.369.737	195.607
- Pengeluaran tidak tetap	97.263.300	3.420.735	911.343
<b>Pengeluaran rumah tangga</b>			
- Harian	42.987	19.695	35.000
- Bulanan	158.287	134.212	2.713.900
- Tahunan	7.542.257	3.410.950	32.566.802
<b>Total pengeluaran (Pertanian + RT)</b>	<b>104.805.557</b>	<b>6.831.685</b>	<b>32.566.802</b>

Rata-rata pengeluaran tetap adalah sebesar Rp 195.607,- per tahun. Sementara rata-rata pengeluaran rumah tangga per hari adalah sebesar Rp 35.000,-, dimana pengeluaran minimum rumah tangga masih dijumpai sebesar Rp 3.000,- per hari. Total pengeluaran menjadi tinggi karena ada 2 orang responden (suami-istri) pedagang yang menyatakan pengeluarannya Rp 307.661.000 per tahun.

## 2.4. Kelembagaan lokal

Dalam memajukan nagari, Masyarakat Peninggahan membentuk berbagai kelembagaan lokal, baik yang dibentuk melalui bantuan pemerintah, pemuka-pemuka adat, maupun warga masyarakat. Lembaga-lembaga yang dibentuk melalui bantuan pemerintah adalah Wali Nagari dan Kantor Urusan Agama (KUA). Wali Nagari dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dibantu oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Badan Musyawarah Nagari (BMN) yang dibentuk oleh pemuka adat. Selain itu, lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh pemuka adat diantaranya adalah Wali Jorong, dan Bundo Kandung (beranggotakan ibu-ibu). Fungsi utama lembaga-lembaga adat tersebut adalah menangani masalah adat di nagari, diantaranya *tagak penghulu* atau pengangkatan datuk, perkawinan, dan sengketa tanah ulayat (tanah kaum). Selain itu, lembaga adat

juga berperan dalam menentukan program nagari, yakni dengan dilibatkannya lembaga adat oleh Wali Nagari dalam pengambilan keputusan. Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh warga masyarakat cukup beragam, diantaranya adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan kelompok tani di bidang ekonomi; Yayasan Danau Singkarak (YADAS), Ikatan Pemuda Pemudi Subarang (IPPS), kelompok karang taruna, kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di bidang sosial; dan majelis taklim di bidang keagamaan.

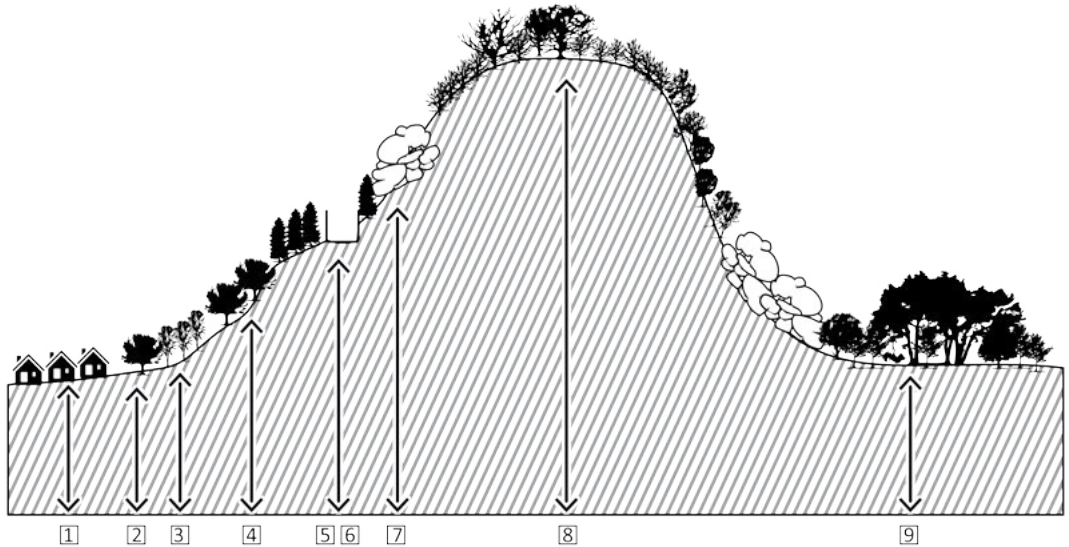
Beberapa kelembagaan sosial yang terdapat di Dusun Buluh Kapur adalah: Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kelompok Wanita Tani (KWT), Forum Kali Bersih (FKB), KUB (Kredit Usaha Bersama) Heler Kopi, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan PKK. Dari seluruh lembaga yang ada di dusun Buluh Kapur, menurut warga yang paling berpengaruh adalah HKm kemudian disusul oleh Bos Kopi (tengkulak), FKB, KUB, PKK. Beragamnya bentuk dan jenis kelembagaan ini ternyata menimbulkan kebingungan pada beberapa masyarakat karena banyak mereka diantara mereka yang menjadi anggota beberapa lembaga sekaligus sehingga sulit membedakan kegiatan pada setiap lembaga. Saat ini perbedaan pada setiap lembaga baru terletak pada perbedaan nama lembaga saja, sedangkan secara kegiatan masih sering terjadi tumpang tindih. Sebagai contoh, HKm dianggap berada di bawah Gapoktan padahal HKm memiliki perbedaan karakter kelembagaan dalam hak pengelolaan lahan kawasan hutan lindung.

Organisasi masyarakat dan kelembagaan di Desa Sesaot relatif berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya sekitar 8 kelompok tani dan 2 kelompok tani perempuan. Dari sekitar 10 kelompok tani tersebut, 3 kelompok diantaranya merupakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Kelompok wanita tani lebih banyak bergerak di pengolahan hasil hutan, seperti usaha pembuatan dodol nangka, rengginang, dan ubi kayu. Permodalan yang dimiliki kelompok merupakan hasil swadaya anggota kelompok. Selain kelompok petani dan kelompok wanita tani, di Desa Sesaot terdapat pula taruna tani (pemuda tani). Jumlah anggota kelompok tani secara keseluruhan mencapai 388 orang, dimana 30, 41% (118 orang) adalah perempuan.

## 2.5. *Transect walks* (jalur transek)

*Transect walks* yang dilaksanakan di Nagari Paninggahan berfokus pada lokasi-lokasi yang memiliki keterkaitan dengan skema PKS, dimulai dari areal permukiman di sekitar Danau Singkarak hingga ke lahan PKS di daerah perbukitan. Topografi wilayah Nagari Paninggahan yang sebagian besar berbukit dan bergelombang tergambarkan dari hasil kegiatan *transect walks*, dimana untuk menuju lahan PKS diperlukan usaha yang keras untuk melewati jalan-jalan yang terjal, licin, dan berbatu-batu, sebagaimana disajikan dalam peta transek (Gambar 2.6). Aksesibilitas menuju lahan PKS yang telah dijelaskan di atas membuat lahan tersebut cukup sulit dijangkau oleh perempuan. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurangnya keterlibatan perempuan dalam implementasi skema PKS di Nagari Paninggahan. Aksesibilitas menuju lahan PKS ini perlu mendapat perhatian agar perempuan dan laki-laki dapat bekerjasama lebih baik dalam skema PKS tersebut.

Gambar 2.4. Peta transek bentang lahan di Nagari Paninggahan



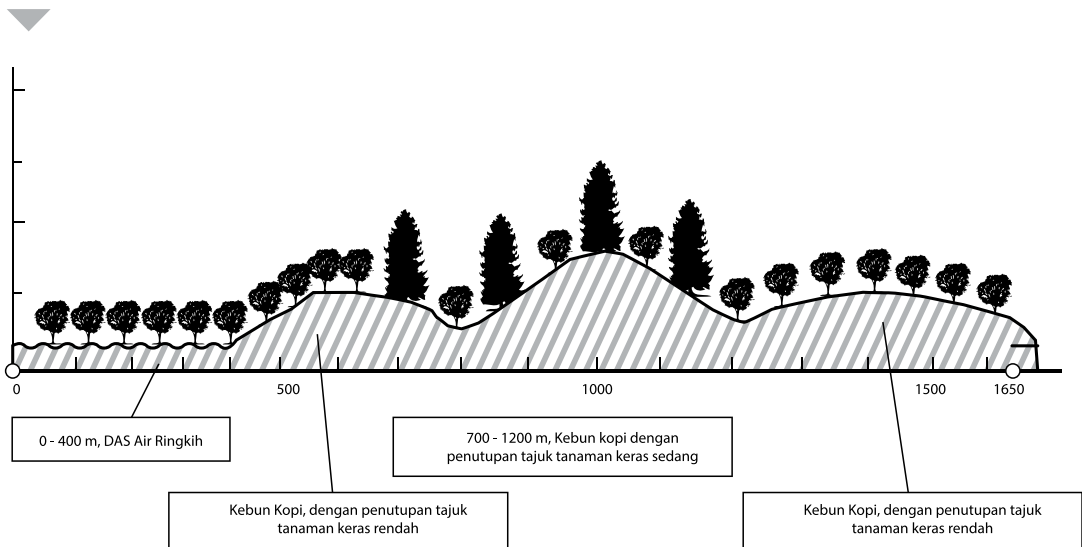
Keterangan: 1. Rumah; 2. Kubang bawah; 3. Kubang atas; 4. Kandang; 5. Hutan Pinus; 6. Bak air; 7. Bebatuan tajam & terjal; 8. Semak belukar (kebun Pak Armen); 9. Hutan batu tajam

Selain permasalahan aksesibilitas menuju lahan PKS, hak pengelolaan lahan PKS yang merupakan tanah adat/ulayat bisa dikatakan tidak konsisten. Hal ini terlihat dari adanya perpindahan

tanggung jawab pengelolaan PKS pada lahan-lahan tersebut dari satu individu kepada individu lain. Agar PKS dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, hal-hal terkait dengan skema PKS termasuk penanggung jawab lahan, mekanisme pembiayaan, dan manfaat yang akan diperoleh, baik bagi laki-laki maupun perempuan, bahkan bagi anak-anak, dapat diinformasikan sejak awal.

Kegiatan *transect walks* di Sumberjaya dilakukan pada areal pelaksanaan skema IJL yang merupakan lahan di sekitar sungai dengan topografi lereng-lereng tajam dan berbukit (Gambar 2.7). Tanaman terbanyak adalah kopi selain itu juga terdapat semak-semak (belukar), tanaman kayu keras dan tanaman rumput yang sengaja ditanam untuk ternak. Rumah penduduk terpisah-pisah sesuai dengan letak kebun kopi dan menjadi bagian dari kebun kopi. Dampak dari aktivitas rumah tangga terhadap aliran sungai tidak terlihat nyata pada pengamatan pandangan mata. Tidak ada sampah rumah tangga, sampah plastik atau sampah lain di sungai. Hanya ada lima rumah tangga Dusun Buluh Kapur yang menggunakan sungai untuk mandi, buang air besar dan mencuci pakaian. Penduduk lain hanya menggunakan sungai untuk mencuci saat ada peristiwa kelahiran dan tidak membuang sampah di sungai.

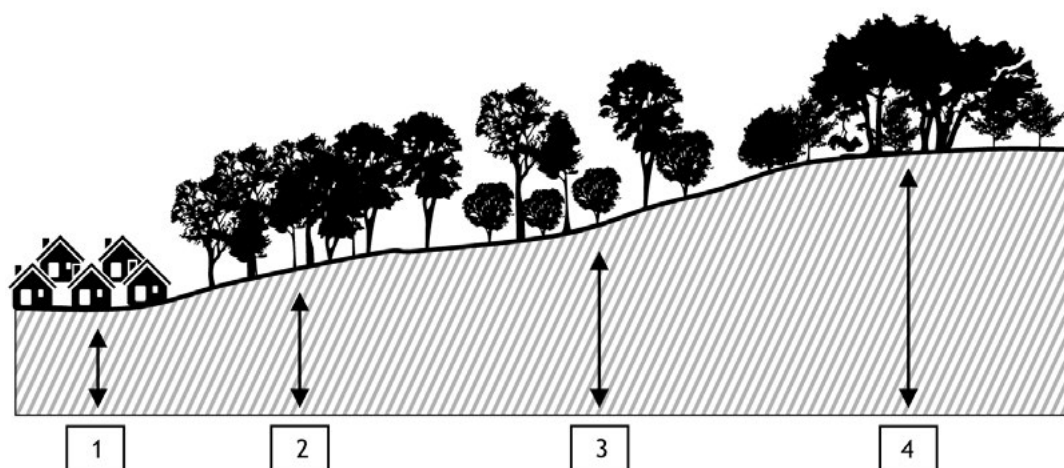
Gambar 2.5. Peta transek bentang lahan lokasi Peduli Sungai Buluh Kapur Lampung



Di Desa Sesaot, kegiatan *transect walks* dilakukan di kawasan HKm Aik Nyet. Kawasan ini meliputi 25 Ha areal HKm yang telah memperoleh ijin Hkm (tergabung dalam KMPH) dan kawasan sekitarnya yang belum memiliki ijin HKm (Gambar 2.8). Pengelolaan Hkm merupakan satu bentuk pengelolaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan tanpa harus merusak kelestarian hutan. Manfaat tersebut antara lain: masyarakat memiliki akses untuk mengelola hutan, menguntungkan (secara ekonomi), dan sebagai tempat pembelajaran mengelola hutan lestari. Hak pengelolaan hutan tersebut diprioritaskan kepada masyarakat yang ada di pinggir kawasan, masyarakat yang tak memiliki lahan milik, dan janda yang memiliki tanggungan, serta orang yang benar-benar mau bekerja.

Di lapangan, terdapat dua skema pengelolaan HKm. Pertama, peserta HKm program, yaitu petani penggarap (pesanggem) yang telah memiliki ijin pengelolaan HKm. Luasan hutan yang dikelola setiap peserta adalah sesuai kawasan yang dikelola dibagi secara adil pada jumlah orang yang bekerja (misal di desa Sesaot, luasan rata-rata 0,15 Ha, di lokasi lain sekitar 0,25 – 0,50 Ha). Kedua, peserta HKm non program, yaitu petani penggarap (pesanggem)

Gambar 2.6. Peta transek bentang lahan lokasi Hkm Sesaot



Keterangan Gambar: 1 = Perkampungan ; 2 = Kumpulan Pohon Kayu; 3 = Lokasi HKm dengan sistem Agroforestry; 4 = Hutan Alam

yang belum memiliki ijin pengelolaan HKm di lokasi yang sebelumnya tak dikelola dengan baik, bahkan menurut beberapa sumber merupakan lahan pengelolaan kayu limbah. Kelompok ini belum mendapat pendampingan (fasilitasi), tetapi mereka sudah melakukan penghijauan lahan. Berdasarkan perkembangan kegiatan kelompok peserta program maupun non program di kawasan hutan Sesaot tersebut, maka kemudian lahirlah Forum Kawasan pada tahun 2006, dengan pertimbangan: (1) banyaknya penebangan liar, (2) sulit menegakkan aturan bersama. Sehingga kemudian lahir kebutuhan bersama untuk membentuk forum kawasan, yang bertugas memayungi kegiatan pengelolaan hutan di wilayah lintas desa, dengan membangun awig-awig (peraturan) yang sama sebagai cara penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

Hasil *transect walk* ini dirangkum pada Tabel 2.6. Tampak bahwa setiap daerah memiliki kekhasan isu, meski untuk aspek gender memperlihatkan bahwa segregasi pekerjaan dipengaruhi oleh pemahaman gender oleh masyarakat sebagai sesuatu yang kodrati. Hal ini berdampak kepada pengambilan keputusan cenderung masih bersifat netral gender, yakni suatu cara pandang yang menganggap kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi antara laki-laki dan perempuan sama. Kebutuhan gender berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga seyogyanya, analisis gender dapat dilakukan sebelum skema IJL dilaksanakan. Fasilitator IJL dan pengelola IJL dari pihak komunitas perlu melaksanakan dialog dengan peserta skema IJL, baik laki-laki dan perempuan, sehingga dapat menangkap aspirasi peserta skema IJL dan mengintegrasikan aspek gender dalam skema IJL. Sebagai contoh, imbal jasa atas skema IJL yang dilaksanakan masyarakat dapat disinkronkan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, lansia, dan kaum marjinal lainnya. Bentuk imbal jasa tersebut, selain dalam bentuk tunai, dapat dipadukan dengan ketersediaan bahan pangan murah dan sehat, energi listrik, air bersih, beasiswa pendidikan, layanan pendidikan vokasi, dan kemitraan usaha.

Tabel 2.6. Analisis hasil *transect walks* di tiga lokasi studi

Pengamatan		Uraian	
	Singkarak	Sumberjaya	Sesaot
Lokasi transek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Areal permukiman di sekitar Danau Singkarak hingga ke lahan PKS di daerah perbukitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sepanjang sub DAS Air Ringkih</li> <li>Lahan-lahan anggota Forum Kali Bersih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan HKM Aik Nyet, meliputi 25 Ha HKM yang telah memperoleh ijin Hkm (tergabung dalam KMPH) dan kawasan sekitarnya yang belum memiliki ijin HKM</li> </ul>
Isu yang dijumpai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani masih memprihatinkan</li> <li>Lahan sawah rentan kekeringan, suplai pakan ternak terbatas</li> <li>Perempuan turut aktif dalam usaha tani ternak dan kemiri</li> <li>Kondisi lokasi IJL di Singkarak sangat sulit dijangkau, curam, licin, dan terjal</li> <li>Terdapat serangan hama penyakit pada tanaman cengkeh dan coklat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberlanjutan hak pengelolaan lahan kawasan,</li> <li>Adanya ganti rugi hak pengelolaan lahan kawasan,</li> <li>Tidak ditemukan tanaman yang harus ditanam sepanjang DAS seperti bambu dan aren</li> <li>Penerapan teknik konservasi rorak* di lahan bagian atas bukit, jauh dari sungai.</li> <li>Sedimentasi masih ditemukan di sepanjang sungai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepastian hak pengelolaan HKM. Ada area yang telah mendapatkan ijin HKM dan ada yang belum mendapatkan ijin.</li> <li>Keresahan petani dengan perubahan status kawasan HKM menjadi Taman Hutan Raya (Tahura)</li> <li>Ada kasus pengalihan (jual beli) hak pengelolaan lahan HKM tanpa sepengetahuan kelompok</li> <li>Perempuan lebih banyak berperan sebagai pemelihara kebun dan memanen hasil kebun</li> </ul>
Penyebab munculnya isu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pembangunan belum spesifik kebutuhan lokal</li> <li>Belum adanya pendampingan baik oleh penyuluh maupun pihak lain terhadap petani dan peternak</li> <li>Program pemberdayaan masyarakat masih bergantung kepada kekuatan eksternal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketidakterjaminan keberlanjutan hak pengelolaan lahan kawasan</li> <li>Ganti rugi hak pengelolaan lahan kawasan menyebabkan masuknya pemilik modal luar yang membeli tanaman kopi dan mengelola tanaman kopi dengan sistem paro.</li> <li>Sebagian besar lahan peserta skema IJL masih hanya ditanami kopi tanpa tanaman keras, rumput, bambu ataupun aren yang berfungsi untuk mengurangi longsor</li> <li>Teknik konservasi rorak memerlukan tenaga kerja cukup besar, belum semua kebun dilengkapi dengan rorak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan status Kawasan Hutan Sesaot menjadi Taman Hutan Raya (Tahura)</li> <li>Adanya petani anggota kelompok (KPMH) yang telah mendapatkan ijin HKM dan kelompok petani yang belum mendapatkan ijin HKM</li> <li>Adanya stereotipi dan subordinasi mengenai peran perempuan, dimana perempuan diposisikan hanya pada peran domestik dan harus mengikuti keputusan laki-laki</li> </ul>



Pengamatan	Singkarak	Uraian	Sesaot
Singkarak		Sumberjaya	Sesaot
Pihak terkait isu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Desa dan Kabupaten (perencanaan pembangunan),</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (pengelolaan saluran irigasi)</li> <li>Dinas Pertanian (usaha tani kemiri dan pemberdayaan petani)</li> <li>Dinas Peternakan (usaha tani ternak)</li> <li>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Dinas Kesehatan (pemberdayaan perempuan dan keluarga)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Departemen Kehutanan, penggarap</li> <li>Departemen Kehutanan, penggarap, pemilik modal skema IJL</li> <li>Anggota Forum Kali Bersih, PLTA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petani HKm (pesanggem)</li> <li>Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat (pro HKm)</li> <li>Dinas Pertanian Prop. NTB (pro Tahura)</li> <li>Departemen Kehutanan (ijin peruntukan kawasan)</li> <li>Forum Kawasan (kelembagaan petani HKm)</li> <li>KONSEPSI (LSM pendamping)</li> </ul>
Peran perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>IJL masih merupakan kegiatan yang didominasi laki-laki</li> <li>Perempuan berperan dalam bidang ekonomi produktif dan sosial, namun kurang tampak dalam pengambilan keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yang mengadakan perjanjian IJL dengan Dinas Kehutanan adalah laki-laki, peran perempuan terbatas, dapat mengakses informasi, terlibat dalam kegiatan, pengurusan dan pengambilan keputusan di FKB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peran perempuan hampir tidak ada, karena pengambilan keputusan untuk kebijakan lebih banyak dilakukan di tingkat kelompok dan Forum Kawasan</li> </ul>
Alternatif solusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan pembangunan melibatkan peran serta masyarakat</li> <li>Program KB dan Posyandu lebih diintensifkan</li> <li>Pembagian kerja dalam keluarga yang berimbang, termasuk inovasi penghematan curahan waktu</li> <li>Pembenahan sarana dan prasarana irigasi dan distribusi air secara adil dan merata</li> <li>Monitoring pemeliharaan tanaman dan hasil-hasilnya melalui penyuluhan dari dan oleh petani (<i>Farmers-managed extension</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antara pihak yang terlibat dalam HKm harus patuh kepada peraturan tentang lahan. Departemen Kehutanan: mematuhi perjanjian HKm 35 tahun dan Penggarap: tidak mengalihkan hak pengelolaan lahan garapan</li> <li>Pemilik modal: tidak membeli lahan kebun kopi dari pemegang hak pengelolaan kawasan</li> <li>Anggota FKB: menjalankan kesepakatan menurunkan sedimentasi sampai 30%. PLTA: memantau pelaksanaan IJL dan memberikan IJL sesuai kesepakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan kawasan hutan bersama masyarakat</li> <li>Kepastian status kawasan Sesaot yang memperhatikan aspirasi petani dan aspek konservasi</li> <li>Mendorong partisipasi perempuan melalui pembentukan kelompok taniperempuan yang fokus pada pengolahan hasil produksi kebun</li> <li>Melakukan penguatan kapasitas petani dan kelembagaan petani</li> </ul>

Sumber: Diolah dari data primer

\*) Rorak merupakan teknik konservasi untuk mengurangi erosi dengan membuat lubang  $\pm 1 m^2$  dengan jarak 0.5-1 m dari pohon kopi.

## 2.6. Skema Imbal Jasa Lingkungan

### 2.6.1. Skema Imbal Jasa Lingkungan di Singkarak

Studi yang dilakukan ICRAF pada tahun 2004 tentang potensi-potensi sumber daya alam dan lingkungan di kawasan Danau Singkarak, mendorong munculnya Program RUPES yang memperkenalkan skema Pasar Karbon Sukarela (PKS) di Nagari Paninggahan. Luas lahan kritis di sekitar Danau Singkarak saat ini sekitar 6200 hektar dan ditambah 9773 hektar lahan kritis di dataran tinggi yang dimiliki marga. Area skema IJL di Singkarak meliputi dataran tinggi yang berbukit-bukit, yakni Bukit Labi, Bukit Tambang Manyiak, Bukit Panjang, dan Bukit Talago Indah.

Skema yang berfokus kepada penyerapan karbon ini diharapkan dapat memulihkan kondisi agro-ekosistem hutan melalui penanaman lahan tidak produktif. Dalam skema ini, petani-petani di Nagari Paninggahan yang bergabung dalam kelompok-kelompok pengelolaan lahan berperan sebagai penyedia jasa lingkungan, dan sebuah perusahaan swasta yang berkedudukan di Belanda, yaitu CO<sub>2</sub> Operate BV, berperan sebagai pemanfaat jasa lingkungan. Kontrak skema IJL melalui skema PKS di Nagari Paninggahan mulai dilaksanakan pada 1 September 2009 dan akan berakhir pada tahun 2018, dimana terdapat empat representasi organisasi dalam kontrak tersebut, yaitu: CO<sub>2</sub> Operate BV, *World Agroforestry Centre* (ICRAF-SEA), Kanagarian Paninggahan, dan Yayasan Danau Singkarak.

Dalam kontrak tersebut, petani harus memenuhi persyaratan penanaman beberapa jenis pohon yang telah disepakati dengan jumlah 1.100 bibit per hektar. Jenis pohon yang harus ditanam oleh petani meliputi cengkeh (*Eugenia aromatica*), coklat (*Cocoa*), alpukat (*Persea americana*), durian (*Durio zibertinus*), mahoni (*Swietenia mahogany*), surian (*Caeseria grewiaefolia*), dan pinang (*Pentace sp*). Selain itu, petani juga diharuskan untuk mengikuti pelatihan tentang penyiapan lahan, penanaman, dan perawatan pohon, serta aspek terkait lainnya. Sebagai imbalan atau *reward* atas usaha yang dilakukan petani, CO<sub>2</sub> Operate BV telah menyediakan dana sebesar Rp 10 juta per hektar untuk masa kontrak 10 tahun dengan mekanisme penyaluran dana sebagai berikut:

**Tahap 1** sebesar 60% diberikan setelah penandatanganan kontrak dilakukan

**Tahap 2** sebesar 15% diberikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah pembayaran tahap 1,

**Tahap 3** sebesar 20% diberikan pada saat akhir tahun ke-5/ pertengahan kontrak, dan

**Tahap 4** sebesar 5% diberikan pada saat akhir kontrak pada tahun ke-10.

Nilai kontrak yang diterima oleh masing-masing petani bervariasi tergantung pada luasan lahan yang dimiliki. Disepakati, pihak pengelola dari nagari (disebut pengurus PKS) akan mengelola dana sebesar 12,5% dari total kontrak untuk biaya administrasi, pengawasan, dan pengelolaan program PKS di nagarinya untuk masa kerja selama 10 tahun.

### 2.6.2. Skema Imbal Jasa Lingkungan di Sumberjaya

Program skema IJL di Sumberjaya dilaksanakan di lahan yang 70 persen diantaranya termasuk kawasan hutan lindung dan dikelola masyarakat melalui HKm. Konsep imbal jasa untuk pelayanan lingkungan dibangun dalam dua prinsip: (1) hak pengelolaan lahan sebagai bentuk imbal jasa dan (2) imbalan atas upaya masyarakat mengurangi kerusakan lingkungan di DAS dengan pembangunan PLTA. Prinsip pertama penting karena daerah pelaksanaan program merupakan daerah yang memiliki sejarah konflik yang panjang mengenai hak pengelolaan lahan di wilayah hutan lindung. Jaminan hak pengelolaan lahan merupakan imbal jasa yang sesuai dengan upaya pelestarian wilayah hutan lindung oleh masyarakat.

Prinsip kedua penting karena air dan tenaga listrik merupakan dua hal yang saling mendukung. Di satu sisi, tenaga listrik diperlukan oleh masyarakat dan di sisi lain masyarakat dapat mendukung ketersediaan air yang cukup sebagai sumber PLTA melalui pelestarian sumberdaya air. Upaya ini selaras dengan prinsip pertama. Dengan upaya-upaya pengurangan sedimentasi air sungai, wilayah kawasan hutan lindung yang dikelola masyarakat akan terjaga dan hak pengelolaan lahan kawasan semakin terjamin untuk

masyarakat. Skema IJL di Sumberjaya dilaksanakan dalam lima strategi yakni:

1. Memfasilitasi penguatan program kehutanan lokal dalam program HKm.
2. Membangun keakuratan data dan informasi tentang sumber-sumber erosi dan sedimentasi dan dinamika aliran sungai secara saintifik (terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan)
3. Bekerja bersama petani untuk membangun kemampuan dan pengertian dalam praktik manajemen, termasuk penguatan penggalan informasi dan monitoring yang mengurangi sedimentasi dan erosi.
4. Penguatan komunitas petani untuk menggunakan informasi terkini agar membuat mereka lebih mampu menegosiasikan kemampuan mereka.
5. Mendesain dan menguji mekanisme pembayaran untuk pelayanan lingkungan. Melalui basis pembayaran pada pengurangan sedimentasi yang secara aktual terjadi, pemerintah dan perusahaan *hydropower* memiliki kepercayaan bahwa pembayaran mereka benar-benar membeli sesuatu yang berharga.

Skema IJL Sumberjaya setidaknya mencakup tiga kegiatan, (1) Penguatan masyarakat agar mampu mengelola lingkungannya sendiri dan membangun posisi tawar dengan pihak luar baik berkaitan dengan lahan yang mereka kelola maupun dengan pembeli jasa dalam RUPES, (2) Pelestarian lingkungan melalui pelestarian DAS yang secara tidak langsung dapat membantu masyarakat melestarikan sumberdaya di lahan dan sumberdaya air bagi kelangsungan kehidupan petani sendiri, dan (3) Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat peserta RUPES melalui upaya-upaya yang mendorong keberdayaan masyarakat.

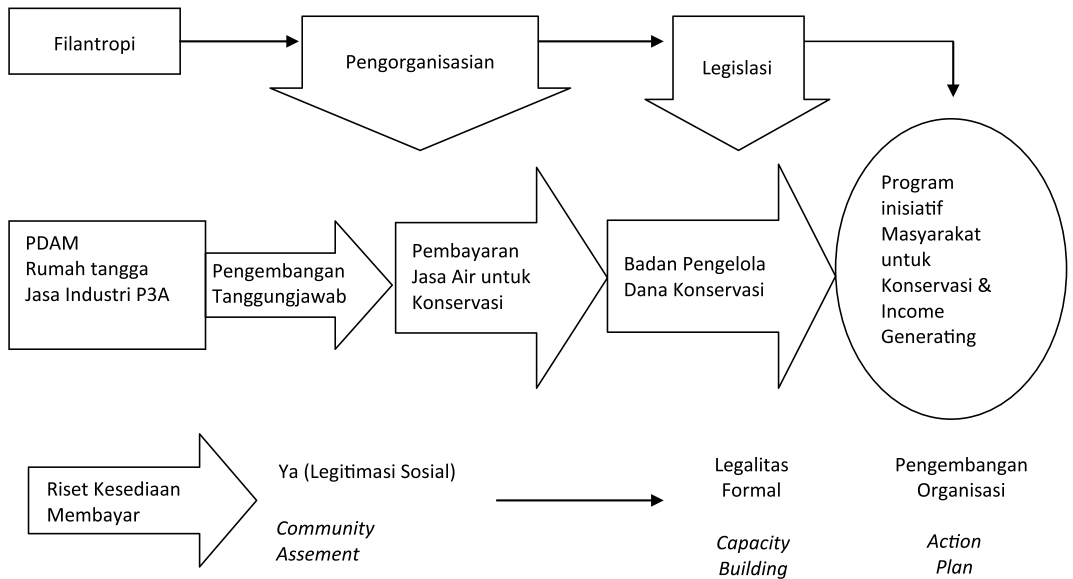
### 2.6.3. Skema Imbal Jasa Lingkungan di Sesaot

Program pembangunan di Lombok Barat yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan adalah Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Kawasan Sesaot dalam rangka implementasi kebijakan kehutanan daerah. Program pengelolaan

hutan Sesaot di Kabupaten Lombok Barat yang relevan dengan skema IJL adalah skema IJL melalui kelembagaan BESTARI (Badan Pelestari Sumber Daya Mata Air Rinjani), yang diinisiasi pada tahun 2009 dan merupakan kerjasama antara ICRAF, LSM KONSEPSI (LSM lokal), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Konsep PHBM di Kawasan Sesaot sudah dimulai sejak 1993 yang pada awalnya diinisiasi oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), kemudian pada prosesnya dilanjutkan oleh KONSEPSI semenjak tahun 2006 hingga sekarang. Pengelolaan Hutan Sesaot sendiri sudah memiliki sejarah panjang dengan beragam multi pihak yang terlibat di dalamnya. Sedangkan penerapan skema IJL yang ada saat ini sedang berada pada tahap penguatan kelembagaan lokal dan belum sampai pada upaya untuk pemberian *reward* bagi masyarakat lokal maupun lingkungan.

Hutan lindung Sesaot sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan jasa lingkungan mengkonversi area sekitar 3.670 Ha, dengan jumlah KK warga Sasar sekitar 6.000-7.000 KK meliputi 5 desa di sekitar kawasan. Seperti halnya dengan perkembangan konsep PHBM di atas, program pengelolaan hutan Sesaot berbasis masyarakat telah diinisiasi pada tahun 1993 oleh LP3ES yang kemudian pada prosesnya dilanjutkan oleh KONSEPSI semenjak tahun 2006 hingga sekarang dengan nama program yaitu Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Lestari (PSDABML). PSDABML merupakan nama program yang dilakukan dalam Hutan kemasyarakatan (HKm). Beberapa inisiasi yang telah dilakukan melalui program tersebut adalah: Hutan Kemasyarakatan, Jasa Lingkungan, adaptasi perubahan iklim, pelestarian kawasan dan peningkatan kesejahteraan, pengembangan kawasan model, pengembangan inisiatif lokal terkait isu lokal dan global.

Kehadiran konsep IJL di Hutan Sesaot beranjak dari timbulnya keprihatinan para pihak terhadap ekosistem Rinjani sebagai daerah tangkapan air bagi 3.167.000 jiwa penduduk Pulau Lombok yang semakin lama semakin menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Telaah terhadap perkembangan yang ada menunjukkan bahwa diperlukan forum untuk menggalang kesepakatan yang mempersatukan hulu-hilir, desa-kota, sekaligus dapat mengintegrasikan tujuan pengembangan ekonomi dan konservasi air. Skema proses pengembangan jasa lingkungan di Lombok digambarkan pada gambar 2.9 berikut:



Gambar 2.7. Skema umum proses pengembangan jasa lingkungan di Lombok (KONSEPSI, 2009)

Sampai saat ini kegiatan pengelolaan Hutan Sesaot masih lebih berfokus kepada PHBM daripada skema IJL karena saat ini masyarakat setempat masih berkuat dengan upaya penguatan aspek kelembagaan pengelolaan hutan. Menurut pendamping kegiatan (KONSEPSI), bagi masyarakat hulu saat ini masih mengutamakan perjuangan untuk kepastian hak kelola hutan. Secara moral, mereka sudah menyadari motto HKM “hutan lestari masyarakat sejahtera”. Kalau hak kelola hutan tidak dapat dimiliki, kegiatan untuk mengembangkan hal-hal yang bersifat lebih berkelanjutan (konservasi DAS) masih jauh dari harapan.



# Bab 3

## Isu gender dalam skema IJL di tiga lokasi

*Siti Amanah, Defina, Ninuk Purnaningsih, Agustina M. Purnomo, Titik Sumarti, Agus Purbathin Hadi, Rachman Pasha dan Nani Saptariani*

**P**rogram IJL dimulai pada sekitar tahun 2007-2009, meskipun proses inisiasi ada yang terjadi sejak tahun 2004. Mekanisme pelaksanaan program adalah dengan melakukan kegiatan yang mendukung perbaikan fungsi DAS dan penyerapan karbon, seperti penanaman pohon, konservasi tanah dan air untuk mengurangi laju erosi baik di area DAS, area Hutan Kemasyarakatan atau lahan tidak produktif. Pelaksanaan skema IJL di tiga lokasi ini beragam ditinjau dari mulai pelaksanaan program, cakupan wilayah pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, kondisi pelaksanaan program dan bentuk imbal jasa yang diberikan. Tabel 3.1 menampilkan skema IJL dan deskripsi bentuk IJL di tiga lokasi studi.

Tabel 3.1. Deskripsi skema IJL di tiga lokasi studi

Uraian	Lokasi IJL		
	Singkarak	Sumberjaya	Sesaot
Jasa lingkungan	Penyerapan karbon	Perbaikan fungsi DAS untuk mengurangi laju erosi	Perbaikan fungsi DAS untuk kualitas air
Tahun mulai program	1 September 2009.	Inisiasi mulai tahun 2004. Forum Kali Bersih berkembang mulai tahun 2007	Tahun 2009
Cakupan wilayah pelaksanaan program	Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok	Kecamatan Sumberjaya dan Way Tenong, sepanjang DAS Way Besay. Fokus pada Sub DAS Air Ringkih yang melalui Dusun Buluh Kapur dengan luas wilayah 288 Ha	Kawasan Hutan Lindung Sesaot yang merupakan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 3.670 Ha, 5 desa di sekitar kawasan.



Uraian	Lokasi IJL		
	Singkarak	Sumberjaya	Sesaot
Mekanisme pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman pohon pada lahan tidak produktif sebagai upaya penyerapan karbon</li> <li>• Petani berkelompok berperan sebagai penyedia jasa lingkungan,</li> <li>• Penanaman lahan kritis dengan 1.100 bibit per hektar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman pohon oleh anggota kelompok melalui prinsip-prinsip konservasi DAS</li> <li>• Penguatan masyarakat melalui kelompok FKB</li> <li>• Pengurangan sedimen pada aliran sungai sampai dengan 30 persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersatukan hulu-hilir. Hulu menanam (hutan dan sumberdaya air), hilir menikmati melalui jasing yang dihasilkan.</li> <li>• Pembayaran jasa air untuk konservasi, dikelola oleh badan pengelola dana konservasi</li> <li>• Dana konservasi digunakan untuk program Income Generating</li> </ul>
Imbal jasa yang diberikan	Rp 10 juta per hektar untuk masa kontrak 10 tahun	Mikrohidro dari PLTA senilai 30 juta	Pembayaran jasa IJL melalui retribusi pelanggan PDAM
Kondisi pelaksanaan program	<p>Penanaman lahan kritis di areal PKS telah dilakukan oleh kelompok tani. Dana pemeliharaan tanaman, saat studi dilaksanakan belum diterima masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2007 dibentuk FKB, pembangunan DAM serta pemasangan Turbin.</li> <li>• Penanaman pohon, rumput, aren dan bambu serta beberapa penerapan teknik konservasi</li> <li>• Imbal jasa berupa listrik baru dapat dinikmati mulai tahun 2010, karena turbin terdahulu terkena banjir tidak lama setelah terpasang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk kelembagaan BESTARI (Badan Pelestari Sumberdaya Mata Air Rinjani), dimulai tahun 2009</li> <li>• Masih terfokus pada penguatan kelembagaan lokal (BESTARI DAN Institusi Multipihak atau IMP) sehingga skema IJL belum terlaksana sesuai prinsip.</li> <li>• Dana imbal jasa lingkungan yang bersumber dari retribusi belum bisa dikeluarkan.</li> </ul>

### 3.1. Persepsi perempuan dan laki-laki tentang gender

Persepsi perempuan dan laki-laki tentang gender diidentifikasi dari pendapat sejumlah peserta diskusi kelompok (FGD) yang dilakukan dua tahap, yaitu pada FGD 1 dan FGD 2. FGD 1 dilaksanakan dengan peserta laki-laki dan FGD 2 dengan peserta perempuan atau istri atau putri peserta program IJL.

Pada awal diskusi, konsep gender belum dapat dipahami secara utuh oleh peserta program, baik oleh peserta laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya para peserta memahami gender sebagai pemilahan manusia laki-laki dan perempuan menurut jenis kelamin. Artinya, perbedaan laki-laki dan perempuan dipandang dari sisi biologis.

Tabel 3.2 menyajikan hasil FGD tentang persepsi peserta FGD tentang ciri-ciri dan peran laki-laki dan perempuan di tiga lokasi penelitian dikelompokkan menurut ciri fisik, sifat dan budaya.

Tabel 3.2. Hasil FGD tentang ciri-ciri laki-laki dan perempuan disarikan dari FGD1 dan 2

Penciri	Laki-laki (L)	Perempuan (P)
Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung jawab terhadap keluarga lebih besar</li> <li>• Memiliki fisik lebih kuat daripada perempuan, mempunyai jakun, merokok dan minum kopi</li> <li>• Rambut pendek</li> <li>• Memiliki genital laki-laki, payudara tidak berkembang/kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu suami, patuh pada suami</li> <li>• Tidak bisa kerja sekuat lelaki, lemah, gampang menangis</li> <li>• Rambut panjang</li> <li>• Memiliki rahim dan genital perempuan, mengalami menstruasi, payudara, melahirkan, memiliki ASI</li> </ul>
Sifat	Berani, tegas, maskulin, egois, keras, tegas	Sabar, feminim, teliti

Penciri	Laki-laki (L)	Perempuan (P)
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan/kepala keluarga, berkuasa di rumah tangga, dalam agama sebagai imam, mengurus hal-hal besar, berhubungan dengan pihak luar desa dan membuat kesepakatan</li> <li>• Mencari nafkah, memberi nafkah pada perempuan</li> <li>• Membantu pendidikan anak</li> <li>• Memakai celana panjang, topi, kemeja</li> <li>• Sembahyang Jumat</li> <li>• Tugas mencangkul sawah, mengurus kebun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya membantu suami dalam mencari nafkah tanpa ada kemutlakan, mengurus kegiatan-kegiatan kecil yang dianggap remeh, hanya terlibat dalam penyiapan konsumsi dalam berhubungan dengan pihak luar desa</li> <li>• Mengurus anak, mengurus rumah, menyusui, masak, mencuci, melayani suami, pelayan keluarga</li> <li>• Mengendalikan biaya rumah tangga</li> <li>• Mendidik anak</li> <li>• Menggunakan rok, busana muslimah</li> <li>• Tidak sembahyang Jumat</li> <li>• Menanam di sawah</li> </ul>



FGD partisipatif dengan melibatkan peran aktif peserta selama proses diskusi (foto: tim penulis)

Melalui proses diskusi antara fasilitator dan peserta selama proses FGD berlangsung, pada akhirnya para partisipan FGD memahami dan sepakat mengenai konsep gender. Konsep gender yang disepakati adalah Perbedaan tersebut lebih penting dibandingkan dengan perbedaan fisik dan biologis antara perempuan dan laki-laki.

## 3.2. Profil aktivitas domestik dan publik

### 3.2.1. Profil aktifitas domestik dan publik

Profil dalam aktivitas domestik dan publik untuk laki-laki dan perempuan diukur dari persentase peran laki-laki dan perempuan yang ada dalam rumah tangga terhadap peran domestik, peran sosial dan peran produktif. Jenis-jenis peran tersebut ditentukan berdasarkan kajian terdahulu terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ketiga wilayah studi.

Tabel 3.3. Profil pembagian kerja dalam aktivitas domestik dan publik di tiga wilayah

Pembagian kerja	Panningahan (%)		Sumberjaya (%)		Sesaot (%)	
	L	P	L	P	L	P
<b>1. Domestik</b>						
Penyediaan air untuk keluarga	**)	*)	41	59	**)	**)
Pengasuhan anak	15	85	40	60	30	70
Memasak	0	100	29	71	8	92
Mengurus kesehatan keluarga	52	48	44	56	49	51
Mengurus sekolah anak	42	58	40	60	28	72
Pengelolaan keuangan keluarga	57	43	43	57	53	47
<b>2. Publik: Sosial Ekonomi</b>						
Pengurus lembaga lokal (sosial, ekonomi)	87	43	59	41	78	12
Menghadiri kegiatan kemasyarakatan	69	31	50	50	49	51
Kepanitiaan hari-hari besar	-	-	59	41	75	25
Gotong royong	50	50	64	36	65	35

\*) Pemenuhan kebutuhan air di Panningahan dipenuhi melalui Program Penyediaan Air Minum dan Air Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan di Sesaot melalui program swadaya masyarakat

Hasil analisis peran gender di atas menunjukkan peran perempuan lebih banyak dalam peran domestik dan peran sosial kemasyarakatan serta juga membantu para laki-laki dalam peran ekonomi produktif. Peran perempuan terbesar berada pada peran domestik seperti memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah, menyiapkan makanan dan menyediakan air bersih. Hanya pada beberapa peran domestik yang memerlukan kekuatan fisik saja yang melibatkan laki-laki seperti mencari dan memotong kayu bakar.

Sebaliknya, peran laki-laki dalam peran domestik hanya sebatas membantu istri. Laki-laki secara total menggantikan peran perempuan dalam peran domestik pada kejadian tertentu seperti pada saat istri sedang melahirkan, sakit atau istri pulang kampung. Ini menunjukkan sebenarnya laki-laki mampu mengerjakan pekerjaan domestik sama baiknya dengan perempuan. Peran kemasyarakatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki seperti menghadiri rapat, sedangkan perempuan lebih banyak menyiapkan makanan, menghadiri undangan/hajatan dan arisan. Alasan yang melandasi pemilihan peran tersebut adalah faktor kemampuan fisik laki-laki dan perempuan.

Laki-laki lebih banyak berperan dalam usaha ekonomi produktif. Perempuan juga berperan dalam kegiatan ekonomi produktif, seperti dalam perawatan kebun, memetik hasil panen, menanam sayuran, dan menjemur kopi (di Sumberjaya) dan memasarkan hasil panen (di Sesaot). Namun peran perempuan dianggap hanya sebatas membantu laki-laki dan pekerjaannya dianggap lebih ringan dari pada laki-laki sehingga sumbangan perempuan dalam peran produktif dianggap lebih kecil daripada laki-laki.

Hal yang sama terjadi pada peran laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan skema IJL. Peran-peran yang mengandalkan kekuatan fisik, berhubungan dengan pihak luar desa atau mengambil keputusan penting dilakukan oleh laki-laki. Perempuan mengambil peran yang berkaitan dengan peran domestik, peran yang khusus dilakukan oleh perempuan atau yang berhubungan dengan perempuan lain dan peran yang tidak memerlukan kekuatan fisik yang terlalu besar.

Keterbatasan akses perempuan terhadap aktivitas publik sosial dan produktif di Paninggahan, Sumberjaya dan Sesaot terkendala oleh faktor topografi wilayah, waktu kegiatan yang tidak tepat dan aktivitas perempuan di ranah domestik. Hal ini terlihat pada pertemuan-pertemuan kelompok, dimana waktu pertemuan seringkali berbenturan dengan aktivitas perempuan lainnya.

Perempuan yang aktif terlibat di organisasi dapat ditemukan di Sumberjaya. Peran penting perempuan dalam organisasi-organisasi yang ada di desa dapat terlihat terutama pada organisasi yang dibentuk khusus untuk perempuan seperti PKK dan KWT. Pada

dua organisasi tersebut, perempuan sudah pasti menjadi ketua sedangkan pada organisasi lain, biasanya posisi perempuan hanya sebagai anggota, sekretaris atau bendahara saja. Masyarakat masih beranggapan bahwa sekretaris dan bendahara merupakan dua posisi yang dianggap paling tepat diduduki perempuan, sedangkan posisi ketua dianggap masih belum pantas diduduki perempuan.

Di Sesaot, pengelolaan lahan di hutan dilakukan secara bersama-sama. Bapak-bapak lebih banyak bekerja ketika awal penggarapan lahan (pemilihan lokasi, pembersihan dan persiapan lahan, penggalian lubang tanam, penanaman serta pemupukan). Ibu-ibu lebih banyak bekerja pada saat pemanenan, pengangkutan, pengolahan hasil panen, dan penjualan hasil panen. Kegiatan pembersihan dan pemeliharaan lahan dilakukan secara bersama-sama. Pohon yang ditanam pada umumnya adalah jenis tanaman berumur panjang sehingga pengelolaannya tidak terlalu berat (hanya di awal penggarapan dan saat panen). Selain menanam tanaman berumur panjang, petani biasanya juga menanam tanaman berumur pendek (kacang, talas, padi, dll.). Hal ini biasanya dilakukan pada masa-masa awal pembukaan lahan dimana tajuk pohon belum terlalu tinggi. Hampir seluruh proses persiapan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman berumur pendek dilakukan oleh perempuan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi nyata dalam pengelolaan hutan Sesaot. Namun dalam kegiatan penguatan kelembagaan kelompok maupun penyuluhan maka partisipasi perempuan relatif masih rendah. Laki-laki yang tergabung dalam kelompok menyadari kontribusi perempuan dalam pengelolaan hutan Sesaot, mereka juga memberi akses bagi perempuan untuk hadir dalam kegiatan kelompok. Demikian pula perempuan menyadari kontribusi mereka dalam pengelolaan hutan Sesaot, namun mereka tidak mau ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan kelompok laki-laki.

Kondisi akses perempuan yang terbatas pada aktivitas publik sosial dan produktif tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kepemilikan sumberdaya. Sebagai contoh, tingkat pendidikan perempuan yang lebih tinggi dari pada laki-laki di Sumberjaya. Responden perempuan di Sumberjaya rata-rata berpendidikan

SMP, ada pula yang berpendidikan SMEA bahkan D3. Apabila dalam suatu rumah tangga tingkat pendidikan suami lebih rendah dari istri, namun tetap suami memandang istri berada pada posisi yang lebih rendah dan harus taat pada suami. Pada umumnya masyarakat menyatakan bahwa faktor tingkat pendidikan istri tidak mempengaruhi perlakuan suami kepada istri.

Peran istri juga dianggap kurang ketika menentukan alokasi keuangan rumah tangga. Hal ini bertolak belakang dengan fakta bahwa kepemilikan kebun kopi yang merupakan sumber utama penghasilan dalam suatu rumah tangga ternyata sebagian besar merupakan milik keluarga istri. Sedangkan para suami sebagian besar adalah pendatang yang datang ke Dusun Buluh Kapur, Sumberjaya untuk mencari pekerjaan sebagai buruh di kebun kopi. Para suami diangkat menjadi menantu jika dianggap seorang petani yang rajin. Meskipun ada beberapa suami yang mendapatkan lahan dari lahan kawasan dan atas hasil usahanya sendiri, sebagian besar lahan dan rumah di Buluh Kapur merupakan milik istri yang diturunkan dari orang tuanya.

Nilai dan norma budaya masih sangat berpengaruh dalam pilihan peran yang pantas dan tidak pantas dilakukan laki-laki dan perempuan. Ukuran yang digunakan adalah biasa atau tidak biasa serta pantas dan tidak pantas. Di kalangan perempuan sendiri, nilai-nilai dan norma ini masih kuat berpengaruh. Ungkapan seperti “memang perempuan bisa?” atau “masa perempuan melakukan itu”, sering dikeluarkan tanpa sadar oleh perempuan dalam setiap kesempatan. Bagi sebagian besar responden perempuan, pekerjaan domestik masih menjadi pekerjaan utama sedangkan pekerjaan lain di luar rumah hanya sebagai pekerjaan tambahan. Ini pula yang menjadi alasan bagi beberapa responden perempuan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan keorganisasian yang diikuti oleh suaminya meskipun diijinkan suami. Beberapa responden berpendapat peran non domestik perempuan sangat penting.

Disadari oleh peserta FGD, ada hal-hal yang hanya bisa terlaksana dengan baik jika perempuan dilibatkan, karena hanya perempuan yang mengerti kebutuhan perempuan sendiri. Peserta FGD juga menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam peran publik, ekonomi maupun organisasi tidak boleh melampaui laki-laki dan

tetap menjadikan keluarga sebagai perhatian utama. Dikemukakan bahwa dukungan laki-laki terhadap pada peran perempuan bermakna mengizinkan perempuan berkiprah dalam publik, namun jangan sampai keluar dari tugas utamanya di rumah tangga.

### 3.2.2. Profil akses terhadap sumberdaya dan manfaat

Profil akses responden dibedakan menjadi akses terhadap sumberdaya dan akses manfaat sumberdaya (Tabel 3.4).

Sumberdaya utama yang dipilih oleh responden di tiga lokasi adalah lahan, inovasi dan teknologi, pelatihan, dan modal. Manfaat utama yang dipilih responden adalah manfaat pendapatan, kesehatan dan jaringan. Berikut gambaran akses sumberdaya dan manfaat di tiga lokasi.

Tabel 3.4. Tingkat akses terhadap sumberdaya dan manfaat IJL di tiga lokasi

Indikator	Singkarak		Sumberjaya		Sesaot	
	L	P	L	P	L	P
<b>Akses sumberdaya</b>						
Lahan	√		√		√	√
Informasi, inovasi dan teknologi	√		√		√	
Pelatihan	√		√		√	
Modal	√		√		√	
Pasar	√		√		√	√
<b>Akses manfaat</b>						
Pendapatan	√	√	√	√	√	√
Kesehatan	√	√	√	√	√	√
Jaringan	√		√		√	

*Keterangan: Tanda √ menunjukkan akses yang dominan*

Akses sumberdaya di tiga lokasi didominasi oleh laki-laki. Hanya di Sesaot, laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama terhadap lahan dan pasar. Besarnya akses laki-laki pada sumberdaya karena laki-laki merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam aktivitas produktif. Akses pada manfaat, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada manfaat pendapatan dan kesehatan, kecuali akses pada jaringan hanya dimiliki oleh laki-laki. Pendapatan rumah tangga sebagian besar dikelola oleh



perempuan. Hanya di Sumberjaya laki-laki masih berperan dalam mengelola keuangan rumah tangga. Fasilitas kesehatan keluarga atau yang disediakan oleh pemerintah dapat diakses baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kurangnya akses perempuan pada jaringan terkait dengan kurangnya aktivitas publik sosial yang melibatkan pihak luar perempuan sendiri dan luar desa. Perempuan hanya berjejaring dengan perempuan sendiri dalam kelompok perempuan atau memfasilitasi pembentukan jejaring antara laki-laki dengan menyediakan konsumsi dan mengurus pelaksanaan pertemuan.

### 3.2.3. Profil kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat

Profil kontrol laki-laki dan perempuan di rumah tangga dalam aktivitas domestik dan skema IJL diukur dari persentase peran perempuan dan laki-laki dalam aktivitas yang dipilih berdasarkan kajian terdahulu (Tabel 3.5). Perbedaan aktivitas disebabkan karena perbedaan karakteristik skema IJL di setiap lokasi.

Tabel 3.5. Kontrol atas aktivitas domestik di tiga lokasi

Jenis Aktivitas	Panninggahan (%)		Sumberjaya (%)		Sesaot (%)	
Pemeliharaan pusaka (rumah)	√	*)	*)	*)	*)	*)
Menentukan menu untuk keluarga	√	√				√
Mengambil keputusan untuk pendidikan anak	√	√	√	√	√	√
Menentukan pendidikan vokasi/kursus anak/ anggota atau anggota keluarga lain	√	√	√		√	√
Menentukan aktivitas sekolah anak	√	√		√		√
Menentukan keberlanjutan sekolah	√	√		√	√	√

\*) Tidak dikenal aktivitas pemeliharaan pusaka (rumah)

Di Panninggahan, peran perempuan lebih dominan dalam pemeliharaan pusaka, pengaturan pola makan, pengelolaan keuangan keluarga, dan keperluan sekolah anak, sedangkan laki-laki terlibat dalam penentuan pendidikan anak dan berperan sebagai

pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Laki-laki mendominasi dalam pengambilan keputusan yang memang dianggap merupakan domain laki-laki dalam aktivitas produktif terutama di bidang pertanian. Namun, dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, perempuan dan laki-laki secara berimbang dapat mengawasi aktivitas tersebut.

Hal yang serupa terjadi di Buluh Kapur dan Sesaot. Peran perempuan yang cukup strategis ada pada pengambilan keputusan di aktivitas domestik terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi dan keputusan-keputusan yang tidak membutuhkan sumberdaya rumah tangga yang cukup besar seperti menentukan pembelian pakaian sekolah, menentukan pembelian buku-buku dan peralatan wajib atau pendukung sekolah. Hal-hal yang lebih strategis seperti menentukan keputusan untuk pendidikan anak dipegang oleh laki-laki dan anak sendiri.

Di Sesaot, pengambilan keputusan masih merupakan wewenang kepala keluarga, dan keluarga di lokasi studi di Desa Sesaot mayoritas dikepalai oleh laki-laki. Kaum perempuan mengambil peran lebih dominan dalam penentuan pangan keluarga, pendidikan anak, dan pemasaran hasil usaha. Data pada Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa istri (perempuan) lebih dominan dalam menentukan keputusan di ranah domestik kecuali dalam hal menentukan pendidikan sekolah anak. Dalam hal ini biasanya laki-laki (suami) dan perempuan (istri) memiliki kontrol yang sama.

Hingga penelitian ini dilakukan, peran perempuan dalam mengambil keputusan baru pada kegiatan-kegiatan yang biasa dianggap sebagai kegiatan perempuan atau kegiatan-kegiatan yang hanya melibatkan perempuan. Misalnya peran perempuan dalam menentukan sosialisasi kelompok pada masyarakat sangat kuat karena perempuan diharapkan melakukan sosialisasi pada perempuan yang lain. Peran perempuan sangat minim pada kegiatan-kegiatan yang dipersepsikan sebagai kegiatan laki-laki. Hal ini meliputi kegiatan dalam pengecekan dam, dan kegiatan dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara drainase. Pada pengelolaan program imbal jasa lingkungan, perempuan yang paling dilibatkan adalah Sekretaris Forum Kali Bersih. Meskipun ada peran dalam pengambilan keputusan kelompok, peran perempuan

terbatas sebagai pencatat atau pemberi saran sementara pengambil keputusan utama adalah laki-laki.

Tabel 3.6. Tingkat kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat IJL di tiga lokasi

Indikator	Singkarak		Sumberjaya		Sesaot	
	L	P	L	P	L	P
Kontrol sumberdaya						
Lahan	√		√	√	√	
Informasi, inovasi dan teknologi	√		√		√	
Pelatihan	√		√		√	
Modal	√		√		√	
Pasar	√		√		√	
Kontrol manfaat						
Pendapatan	√	√	√	√	√	√
Kesehatan	√	√	√	√	√	√
Jaringan	√		√		√	

Kontrol atas sumberdaya lahan, informasi, inovasi dan teknologi, modal dan pasar masih didominasi laki-laki kecuali untuk lahan di Sumberjaya. Kontrol atas manfaat pendapatan, kesehatan dan jaringan bervariasi dari relatif seimbang untuk kontrol pendapatan dan kesehatan sampai tidak ada kontrol perempuan atas manfaat jaringan.

### 3.3. Partisipasi perempuan dan laki-laki dalam skema IJL

Partisipasi perempuan dan laki-laki dalam skema IJL terbagi pada tahap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjut program (Tabel 3.7 sampai dengan 3.10). Secara umum partisipasi perempuan dalam skema IJL di tiga lokasi masih rendah, hampir semua tahapan kegiatan didominasi oleh laki-laki.

Tabel 3.7. Partisipasi dalam tahapan kegiatan perencanaan

Uraian kegiatan	Deskripsi di 3 lokasi penelitian					
	Singkarak		Sumberjaya		Sesaot	
	L	P	L	P	L	P
Menghadiri rapat	√		√		√	
Menentukan program	√		√		√	
Menandatangani kontrak	√		√			
Mengambil keputusan terkait program			√		√	
Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal masyarakat			√		√	
Penyusunan struktur & pembuatan peraturan kelompok			√		√	
Menyediakan konsumsi				√		√

Tahapan kegiatan perencanaan di tiga lokasi skema IJL meliputi: (i) menghadiri rapat, (ii) menentukan program, (iii) menandatangani kontrak, (iv) mengambil keputusan terkait program, (v) berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal masyarakat, (vi) penyusunan struktur & pembuatan peraturan kelompok, dan (vii) menyediakan konsumsi. Pada tahapan kegiatan perencanaan tersebut hampir di semua kegiatan dilakukan oleh laki-laki, kecuali pada kegiatan menyediakan konsumsi.

Pada tahap perencanaan, di Singkarak, perempuan tidak pernah mendapat undangan rapat, sehingga perlu mengundang kedua belah pihak (suami dan istri). Di Sumberjaya, laki-laki berperan dalam seluruh bagian perencanaan. Laki-laki terlibat dalam proses penentuan keterlibatan desa dalam peduli sungai, penentuan jenis kegiatan peduli sungai, penentuan waktu mulai kegiatan, penentuan lama pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam kontrak, penentuan frekuensi gotong royong, penentuan nilai kontrak dan tingkat penurunan sedimentasi air sungai yang disepakati dan penentuan waktu berakhirnya kontrak. Menurut laki-laki, kapasitas perempuan di bidang publik terbatas. Sedangkan menurut perempuan, kesempatan untuk ikut serta terbatas,

kurang keberanian dan kepercayaan diri, serta waktu pertemuan malam hari menyebabkan perempuan tidak dapat hadir. Peluang pengembangan program agar dapat lebih banyak melibatkan perempuan adalah memberi ruang khusus bagi perempuan untuk berkontribusi melalui penyusunan kegiatan khusus perempuan dan pembentukan kelompok khusus perempuan. Hal lain yang dapat dikembangkan adalah memberikan pilihan kepada perempuan pada bidang yang diminati dalam skema IJL, meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan organisasi, serta mengembangkan usaha yang dihela oleh komunitas melalui kerjasama antara perempuan dan laki-laki dalam industri rumah tangga berbasis jasa lingkungan.

Di Sesaot, terdapat budaya (adat) yang disadari oleh laki-laki maupun perempuan yang menyebabkan perempuan kurang bisa berperan dalam proses perencanaan yaitu dimana perempuan tetap di ranah domestik, dan tabu untuk memasuki ranah publik. Peluang pengembangan programnya adalah membentuk kelompok perempuan.

Tabel 3.8 menyajikan data partisipasi laki-laki dan perempuan pada kegiatan pelaksanaan program. Bila dibandingkan dengan tahap perencanaan, partisipasi perempuan pada kegiatan pelaksanaan program sudah mulai tampak, baik pada kegiatan pemeliharaan, pemanenan maupun penjualan. Tahap persiapan lahan dan penanaman dilakukan oleh laki-laki. Perempuan terlibat pada tahap pemeliharaan di tiga lokasi, baik di Singkarak, Sumberjaya, maupun Sesaot. Pada tahap pemanenan, hanya perempuan di Sumberjaya dan Sesaot yang terlibat, sedang pada tahap penjualan hanya perempuan di Sesaot yang terlibat.

Banyak kendala yang dihadapi perempuan sehingga tidak dapat berpartisipasi pada tahap pelaksanaan kegiatan skema IJL di masing-masing lokasi. Di Singkarak, jalan ke lokasi PKS sangat terjal dan sulit diakses oleh perempuan serta adanya ancaman binatang buas disepanjang jalan menuju lokasi kegiatan. Oleh karena itu peluang pengembangan program di masa yang akan datang adalah agar aksesibilitas menuju lokasi PKS dapat diperbaiki sehingga bisa ditempuh oleh perempuan sehingga bisa sama-sama ke ladang dengan laki-laki.

Tabel 3.8. Partisipasi dalam tahapan kegiatan pelaksanaan

Uraian	Singkarak		Sumberjaya		Sesaot	
	L	P	L	P	L	P
Persiapan lahan	√		√		√	
Penanaman	√		√		√	
Pemeliharaan	√	√	√	√		√
Pemanenan	√		√	√		√
Penjualan	√		√			√

Di Sumberjaya, kendala yang dihadapi adalah bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman pohon, pembuatan drainase, pembuatan teras, dll membutuhkan kekuatan fisik yang hanya bisa dilakukan laki-laki. Peluang pengembangan programnya adalah melibatkan perempuan pada kegiatan pembibitan dan penanaman tanaman kecil penahan erosi.

Tabel 3.9 menyajikan data partisipasi laki-laki dan perempuan pada kegiatan pemantauan dan evaluasi program, yang meliputi kegiatan: (i) menilai proses kegiatan, (ii) menilai kemajuan kegiatan, dan (iii) menilai hasil kegiatan. Di Singkarak, kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk menilai hasil belum dilaksanakan. Peserta PKS melakukan proses pemantauan dan evaluasi pada aspek proses kegiatan dan kemajuan kegiatan.

Tabel 3.9. Partisipasi dalam tahapan kegiatan pemantauan dan evaluasi

Uraian	Panningahan		Sumberjaya		Sesaot	
	L	P	L	P	L	P
Menilai proses kegiatan	√	√	√	√	√	
Menilai kemajuan kegiatan	√		√	√	√	
Menilai hasil kegiatan	*)	*)	√		*)	*)

\*) *Belum dilakukan penilaian kegiatan*

Di Sumberjaya, tidak ada responden perempuan yang terlibat dalam tahap pemantauan dan evaluasi. Hanya responden laki-laki yang terlibat dalam kegiatan melihat dan menilai pelaksanaan kegiatan gotong royong peduli sungai dan kegiatan mengukur tingkat sedimentasi air sungai yang termasuk dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam program IJL di Sumberjaya. Hal ini memperkuat

kesimpulan pertama bahwa laki-laki terlibat pada kegiatan yang banyak berhubungan dengan pihak di luar masyarakat. Kegiatan pengukuran tingkat sedimentasi air sungai dilakukan pada saat persiapan program IJL bersama pihak luar. Seluruh responden perempuan tidak tahu teknik mengukur tingkat sedimentasi air sungai. Pelaksanaan program yang tersendat menyebabkan tahapan kegiatan lainnya seperti pemantauan dan evaluasi juga tersendat. Peluang pengembangan adalah dengan menjalankan seluruh tahapan program dan melibatkan lebih banyak anggota di luar pengurus dalam tahap ini. Di Sesaot, peserta program hadir dan merencanakan pemantauan dan evaluasi melalui kelompok yang sudah ada, seperti kelompok pengajian dan arisan.

Tabel 3.10. Partisipasi dalam tahapan kegiatan tindak lanjut

Uraian	Singkarak		Sumberjaya		Sesaot	
	L	P	L	P	L	P
Pembahasan tentang pendanaan IJL untuk pemeliharaan tanaman dan belum ada tindak lanjut	√					
Hanya pengurus inti yang terlibat			√			
Membentuk forum sebagai alat perjuangan mendapatkan hak pengelolaan hutan					√	

Tabel 3.10 menyajikan data partisipasi laki-laki dan perempuan pada kegiatan tindak lanjut. Pada tahap kegiatan ini hanya sebagian kecil saja peserta terlibat, seperti di Sumberjaya hanya pengurus inti saja. Bahkan di Singkarak belum ada tindak lanjut program. Di Sesaot dilakukan pembentukan forum sebagai alat perjuangan mendapatkan hak pengelolaan hutan. Peluang pengembangannya adalah dapat dilakukan pelatihan untuk peningkatan kapasitas perempuan dalam pengolahan hasil hutan dan pemasaran produk hasil olahan, berorganisasi serta pengembangan kader perempuan, serta kepemimpinan.

# Bab 4

---

## Skema IJL yang sensitif dan responsif gender

*Titik Sumarti, Siti Amanah dan Beria Leimona*

IJL memiliki prospek untuk berkembang di masa depan sebagai sebuah alternatif pendekatan pemeliharaan lingkungan melalui peran serta seimbang perempuan dan laki-laki sebagai penyedia jasa lingkungan dan penerima manfaat dari skema. Hal ini menuntut dimilikinya pemahaman akan peran gender dalam rumah tangga dan masyarakat oleh para “aktor” yang terlibat dalam desain, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Implikasinya, program IJL atau yang memiliki prinsip serupa, sedini mungkin, perlu melakukan analisis gender tentang profil akses terhadap sumber daya, pengawasan, pemanfaatan, dan pengambilan keputusan pengelolaan.

Dengan memandang IJL sebagai sebuah skema program, analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)*<sup>5</sup> terhadap IJL dengan menggunakan tiga konteks program IJL di Singkarak, Sesaot, dan Sumber Jaya memperlihatkan bahwa terdapat aspek yang generik pada tiga wilayah tersebut. Tampak bahwa pembagian kerja dilakukan menurut stereotipi, bahwa pekerjaan di dalam rumah merupakan domain perempuan, dan kegiatan publik merupakan domain laki-laki. Di sisi lain, dari aspek konstruksi sosial ekonomi, memperlihatkan bahwa terdapat variasi keterlibatan antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan aspek IJL.

---

5 *GAP merupakan metode analisis gender yang menelaah kebijakan/program/ kegiatan pembangunan pada semua tahapan dari segi mempertimbangkan gender dalam setiap tahap rancang bangun dan implementasi kebijakan. Melalui GAP, dapat dirumuskan kembali kebijakan/program/ kegiatan yang lebih sensitif atau bahkan lebih responsif gender.*



Telaah IJL dengan menggunakan GAP dapat membantu menganalisis sejauh mana skema IJL telah memasukkan aspek gender mulai tahap awal/desain program, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, tindak lanjut, dan pengembangan ke depan. Bagian 4 ini menyajikan sintesis dari prinsip skema IJL, tiga paradigma terkait IJL, dan sensitifitas gender dalam skema IJL.

#### 4.1. Konsep dan paradigma skema IJL

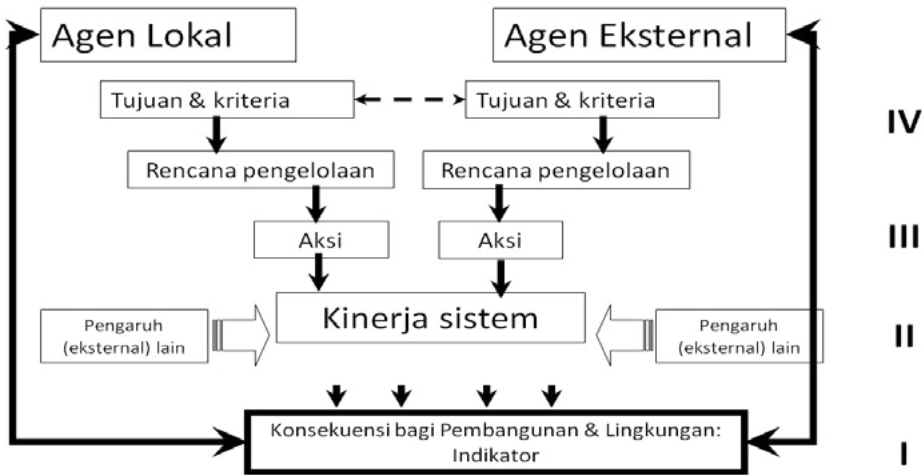
Dalam RUPES, skema PJI juga dikenal sebagai skema Imbal Jasa Lingkungan (IJL) berfokus bahwa “pembayaran” bagi penyedia jasa lingkungan tidak hanya berupa uang tunai tetapi dapat berupa imbalan non-tunai, seperti peningkatan kapasitas masyarakat, fasilitas umum untuk kesehatan dan pendidikan, akses pasar untuk komoditas pertanian dan pekebunan setempat, dan sebagainya. Hasil penelitian di sejumlah negara Asia (Indonesia, Filipina, dan Nepal) menunjukkan bahwa imbalan non-tunai lebih diharapkan oleh masyarakat penyedia jasa lingkungan (Leimona, Joshi, dan Van Noordwijk 2009). Penganut paham PJI berpendapat bahwa pemberian imbalan non-tunai dapat mengurangi efektivitas dari skema karena non-peserta dianggap penunggang bebas (*free rider*) dan peserta tidak menerima pembayaran utuh sebagai pengganti biaya kesempatannya (*opportunity cost*) yang hilang (Pagiola, Arcenas, and Platais 2005; Grieg-Gran, Porras, and Wunder 2005). Kurangnya pembayaran tunai bagi penyedia jasa lingkungan dianggap sebagai salah satu akibat lunturnya performa mereka dalam melaksanakan kontrak konservasi. Namun, perlu pula dipertimbangkan bahwa pemberian uang tunai terutama bagi masyarakat pedesaan, dipandang merendahkan norma sosial mereka dalam melestarikan lingkungan.

Beragam pengalaman penerapan PJI di berbagai wilayah baik di Asia maupun di Amerika Latin menunjukkan tidak banyak pihak yang menerapkan konsep PJI secara murni seperti yang didefinisikan Wunder. Pada kenyataannya, tidaklah mudah untuk mengukur jasa lingkungan secara definitif terutama di negara berkembang. Selain itu, pembayaran tunai dapat mengganggu tatanan sosial serta pengabaian faktor pengentasan kemiskinan sehingga skema PJI tidak berkelanjutan (Van Noordwijk and Leimona 2010). Selanjutnya, van Noordwijk dan Leimona (2010) merekomendasikan tiga paradigma baru dalam mendefinisikan PJI, yaitu: (a) Komoditasi

jasa lingkungan (*Commoditized Environmental Services – COS*) atau setara dengan konsep PJJ yang didefinisikan Wunder, (b) Kompensasi terhadap pengabaian kesempatan (bagi penyedia jasa lingkungan untuk menerapkan pola pengelolaan lahan yang lebih menguntungkan secara finansial) – *Compensation for Opportunities Skipped (COS)*, dan (c) Investasi dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan jasa lingkungan – *Co-Investment and Stewardship in Environmental Services (CIS)*. Pemilahan paradigma ini berdasarkan pengalaman, analisis dan pembelajaran dari lokasi kaji tindak RUPES tahap I, di mana terdapat variasi dalam pembentukan skema IJL, termasuk penerapan konsep kondisional dari IJL (Tabel 4.1).

Konsep skema IJL memiliki prinsip bahwa pemanfaat jasa lingkungan berkontribusi memberikan insentif sukarela kepada penyedia jasa lingkungan agar tetap menjaga fungsi produksi jasa lingkungan secara optimal. Van Noordwijk dan Leimona (2010) menguraikan empat prinsip dalam skema Imbal Jasa Lingkungan:

1. Realistik (*realistic*) – skema IJL dapat secara nyata dan terukur menghasilkan aliran jasa lingkungan dan menjaga stok jasa lingkungan dengan skala waktu dan spasial yang relevan dan relatif terhadap usaha tanpa intervensi (*business as usual*).
2. Sukarela (*voluntary*) – keterlibatan berbagai pihak dalam skema IJL berdasarkan negosiasi melalui prinsip “persetujuan terinformasi dan tanpa paksaan” atau *free and informed choice/consent* di tingkat individu.
3. Kondisional (*conditional*) – imbal jasa lingkungan yang diterima penyedia jasa lingkungan ditentukan oleh sejumlah persyaratan berdasarkan kontrak antar pihak dengan kondisi diketahui dan dimengerti oleh seluruh pihak terlibat. Terdapat empat tingkat kondisionalitas yaitu kesepakatan berdasarkan (1) Performa kuantitas dan kualitas jasa lingkungan (misal: penurunan tingkat sedimentasi); (2) Kondisi agro-ekosistem (misal: penutupan lahan) (3) Aktivitas yang disepakati (misal: penanaman sejumlah pohon); (4) Kesamaan tujuan, kriteria dan perencanaan (Gambar 1);
4. *Pro-poor* – akses, proses, pembuatan keputusan dan keluaran dari skema IJL diprioritaskan menurut tingkat kesejahteraan dan gender, dan didukung bias positif terhadap kaum termarginalisasi.



Gambar 4.1. Tingkat kondisionalitas dari skema Imbal Jasa Lingkungan.

#### 4.1.1. Paradigma CES: komoditisasi jasa lingkungan

Paradigma CES menerapkan tingkat persyaratan I (Gambar 4.1) yaitu bahwa pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa lingkungan didasarkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jasa lingkungan terukur (misalnya: penyedia jasa lingkungan hanya mendapat bayaran sesuai kontrak jika berhasil menurunkan tingkat sedimentasi sejumlah persentase tertentu. Dalam hal ini, penyedia jasa lingkungan tidak berhak mendapatkan pembayaran utuh jika tidak berhasil menurunkan tingkat sedimentasi tersebut walaupun mereka telah melakukan aktivitas optimal dalam melestarikan lingkungan). Paradigma CES berfokus pada interaksi langsung antara masyarakat penyedia jasa dan penerima jasa. Tingkat harga untuk pembayaran tunai sepenuhnya berdasarkan transaksi pasar (berdasarkan asas penawaran dan permintaan – jika permintaan sedikit, maka penawaran terhadap penyedia jasa lingkungan rendah, dan sebaliknya). Pembayaran jasa lingkungan hanya didapat oleh masyarakat yang memiliki kontrol dan kepemilikan penuh atas sumberdaya alam dan lahan mereka secara pribadi. Lahan berkonflik ataupun pengelolaan lahan milik negara sulit menerapkan prinsip dalam paradigma ini. Inovasi yang diharapkan terjadi adalah peningkatan produksi jasa lingkungan dengan pengeluaran biaya konservasi secara efektif. Tidak ada target mengenai kemiskinan secara eksplisit.

#### 4.1.2. Paradigma COS: kompensasi jasa lingkungan

Paradigma COS memberikan pembayaran jasa lingkungan kepada para pengguna lahan yang secara sukarela melakukan aktivitas pelestarian lingkungan, walaupun pada akhirnya aktivitas tersebut dapat mengurangi keuntungan finansial dalam jangka pendek. COS memiliki persyaratan pada tingkat II atau III (Gambar 4.1). Keberhasilan pencapaian kontrak PJJ tergantung kepada kondisi (agro)-ekosistem atau aktivitas pelestarian lingkungan yang telah disepakati melalui kontrak tersebut. Misalnya, penyedia jasa lingkungan akan menerima pembayaran jika lahan mereka telah ditanami pohon dengan jumlah dan ukuran tertentu atau mereka telah melakukan sederetan kegiatan konservasi lahan dan air yang telah disepakati. Berbeda dengan paradigme CES, tingkat produksi jasa lingkungan tidak dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan kontrak bagi penyedia jasa lingkungan. Paradigma COS berfokus pada berbagai relasi dan interaksi antara pemerintah di satu sisi (yang mewakili para warga negaranya) dan sektor swasta dan masyarakat lokal pada sisi lainnya – menggambarkan bahwa IJL banyak dibiayai oleh dana publik dan dana swasta, dan bukan merupakan hubungan transaksi jual-beli secara langsung. Pembayaran secara kolektif dimungkinkan dan dapat berupa pembayaran tunai maupun non-tunai, seperti akses terhadap lahan dan pengelolaan sumberdaya alam di lahan negara. Contoh di Indonesia salah satunya adalah kasus skema hutan kemasyarakatan kondisional di Sumberjaya (Suyanto *et al.* 2008) atau skema PJJ di Cidanau, Banten. Di Cidanau masyarakat petani mendapatkan pembayaran tunai jika mereka berhasil menanam sejumlah pohon berkayu dan memeliharanya dalam jangka waktu tertentu (Leimona, Pasha, and Rahadian 2010). Dasar kompensasi finansial dalam paradigma ini adalah biaya yang mewakili peluang dalam penggunaan lahan yang tadinya menarik secara ekonomi dan diperbolehkan oleh hukum, tetapi mengurangi jasa lingkungan. Target pengurangan kemiskinan dapat ditambahkan melalui diferensiasi dalam membayar pada saat harga ditetapkan secara eksternal dan bukannya dinegosiasikan secara bebas.

### 4.1.3. Paradigma CIS: ko-investasi jasa lingkungan

Paradigma CIS berfokus pada aset dan umumnya mengacu persyaratan pada tingkat IV (Gambar 4.1), dengan tingkat II atau III sebagai bentuk transisi. Pendekatan ini bersifat relatif terhadap lahan milik kolektif atau lahan milik negara dan basis sumber daya alam, sehingga dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Menegosiasikan penggunaan lahan untuk pengelolaan jasa lingkungan; (2) Menekan terjadinya konflik dalam penggunaan lahan dan mengurangi kerusakan sampingan yang ditimbulkan konflik tersebut terhadap jasa lingkungan; (3) Melakukan investasi dalam peningkatan pelayanan publik, jalan penghubung sesuai dengan aspirasi masyarakat; dan (4) Memanfaatkan lahan secara lestari yang menciptakan lapangan pekerjaan. Persyaratan tingkat IV (dengan mempercayakan pengelolaan sumber daya terhadap para pihak lokal) adalah ketika pembeli memiliki kepercayaan penuh terhadap rencana pengelolaan (termasuk monitoring lokal). Rencana pengelolaan dan monitoring dibuat secara partisipatif melibatkan masyarakat penyedia jasa lingkungan dengan kontrak, sanksi dan persyaratan fleksibel sesuai dengan konteks lokal. Secara eksplisit, CIS menambahkan modal sosial ke dalam konsep PJL.

Tabel 4.1. Kompilasi skema IJL di tiga lokasi dengan tingkat kondisionalitas dan paradigma IJL

Lokasi	Jenis jasa lingkungan	Tingkat kondisionalitas dan paradigma	Mekanisme
Singkarak (watershed)	Kualitas air untuk PLTA, konservasi ikan bilih dan ekoturisme	Tingkat IV ( <b>Ko-investasi</b> ) Penanaman 40 hektar padang ilalang dengan pohon kayu dan buah-buahan	Dana konservasi dari pemerintah daerah untuk merevitalisasi kondisi DAS
Singkarak (Pasar Karbon Sukarela)	Penyerapan karbon secara sukarela dengan skema rehabilitasi lahan	Tingkat I ( <b>Komoditisasi</b> ) Penanaman dan pemeliharaan sejumlah pohon untuk mencapai jumlah karbon terserap.	Pasar karbon dinegosiasikan dengan pembeli privat di tingkat internasional
Sumberjaya (Hutan Kemasyarakatan)	Rehabilitasi DAS mendukung program Dinas Kehutanan setempat	Tingkat II ( <b>Kompensasi</b> ) Rehabilitasi lahan dengan pohon kayu dan buah-buahan dengan komposisi tertentu	Akses lahan secara kondisional dengan monitoring yang berkala*

Lokasi	Jenis jasa lingkungan	Tingkat kondisionalitas dan paradigma	Mekanisme
Sumberjaya (Peduli Sungai)	Kualitas air untuk PLTA	Tingkat I ( <b>Komoditisasi</b> ) Pelaksanaan aksi kolektif di sepanjang sempadan sungai untuk merehabilitasi dan menurunkan sedimentasi dengan tingkatan tertentu (>30%)	Dana PLTA dengan kontrak bersama kelompok Sungai Bersih
Sesaot (Hutan Kemasyarakatan)	Rehabilitasi DAS mendukung program Dinas Kehutanan setempat	Tingkat III/IV ( <b>Kompensasi – Ko-investasi</b> ) Rehabilitasi lahan dengan pohon kayu dan buah-buahan dengan komposisi tertentu, namun tidak spesifik di Sumberjaya	Akses lahan melalui skema HKm

Catatan: \*Skema HKm di Lampung Barat memiliki tingkat kedetilan yang lebih lengkap dibandingkan lokasi lainnya di Indonesia yang dituangkan dalam peraturan daerah setempat. Diadaptasi dari Van Noordwijk dan Leimona (2010)

## 4.2. Sensitifitas gender dan rekomendasi dalam skema IJL

### 4.2.1. Rekomendasi responsif gender skema IJL berdasarkan analisis kebutuhan gender

Dalam skema IJL di tiga lokasi, terdapat kesenjangan gender dalam penyediaan Jasling terlihat pada aspek akses dan kontrol terhadap sumberdaya, keterlibatan, dan manfaat yang diperoleh. Isu gender terutama muncul dalam bentuk subordinasi, stereotipi, dan marjinalisasi. Subordinasi berkaitan dengan kondisi yang menganggap seseorang tidak penting dalam suatu kegiatan. Misalnya, dalam pelaksanaan IJL, hanya orang-orang yang memiliki akses terhadap informasi tentang program atau pihak yang memiliki aset lahan, yang umumnya adalah kaum laki-laki yang dapat terlibat. Sedangkan kaum perempuan, karena umumnya tidak memiliki aset dan informasi yang cukup, dianggap tidak penting dan tidak terlibat dalam kegiatan. Stereotipi merupakan pemberian label terhadap kegiatan seseorang terkait ciri-ciri fisik dan sifat. Misalnya, dalam komunitas umumnya perempuan dilabelkan memiliki sifat telaten,

sabar, dan mumpuni, sehingga diberilah pekerjaan-pekerjaan yang berkait dengan ciri tersebut. Marjinalisasi peran gender dalam jaslring tampak pada belum dilaksanakannya pembagian kerja berdasarkan relasi gender yang adil dan setara.

Kontribusi tradisi adat dan budaya masih sangat berperan dalam membentuk persepsi masyarakat melaksanakan kegiatan IJL. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterjangkauan lokasi IJL menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam IJL. Dalam studi ini, faktor agama tidak ditemukan berpengaruh. Faktor ekonomi berpengaruh positif terhadap relasi gender yang setara, yakni kebiasaan laki-laki dan perempuan bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga secara ekonomi laki-laki dan perempuan tidak tampak kesenjangan yang nyata. Secara politik, dominasi elit menyebabkan akses lebih mungkin dimiliki oleh sekelompok orang tertentu.

Sensitifitas gender dalam skema IJL adalah suatu pendekatan mempertimbangkan kebutuhan gender dalam IJL. Kebutuhan gender tersebut ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus, yang berbeda antar kelompok masyarakat, antar etnik, antar wilayah, dan antar budaya. Strategi pemenuhan kebutuhan gender praktis dan strategis memerlukan sinergi antar pihak, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kebutuhan gender meliputi kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Kebutuhan praktis antara lain berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kebutuhan strategis antara lain berkaitan dengan peningkatan posisi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan. Strategi pemenuhan kebutuhan gender praktis dan strategis memerlukan sinergi antar pihak, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Tabel 4.2 menyajikan beberapa contoh kebutuhan gender yang dalam berbagai tahap skema IJL.

Tabel 4.2. Kebutuhan gender praktis dan rekomendasi responsif gender dalam skema IJL

Tahap IJL	Rekomendasi responsif gender berdasarkan:	
	Kebutuhan praktis	Kebutuhan strategis
1. Penentuan cakupan ( <i>scoping</i> ) Identifikasi jasa lingkungan, penyedia dan pemanfaat JL. Identifikasi komponen konservasi dan elemen kontrak PJJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan konservasi dalam IJL memperhatikan komposisi tanaman yang tidak mengabaikan kebutuhan pangan masyarakat, seperti buah-buahan dan sayuran;</li> <li>Adopsi kearifan lokal dari perspektif perempuan dan laki-laki dalam memelihara lingkungan dan meningkatkan kualitas JL.</li> <li>Penyediaan program pendidikan vokasi dengan menyertakan kurikulum mengenai kegiatan konservasi dan jasa lingkungan secara sederhana bagi laki-laki dan perempuan, termasuk remaja putus sekolah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep keseimbangan antara kebutuhan jasa lingkungan dan ketahanan pangan (<i>food security</i>) diterapkan dalam kegiatan konservasi.</li> <li>Pengakuan terhadap kearifan lokal terdokumentasi dan diaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan konservasi.</li> <li>Pendampingan kelompok penyedia jasa IJL dalam penerapan agroforestri, dan konservasi tanah dan air yang tepat untuk meningkatkan kualitas jasa lingkungan.</li> </ul>
2. Negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendayagunaan lahan dan perjanjian kontrak IJL perlu persetujuan kedua belah pihak, istri dan suami.</li> <li>Peningkatan kapasitas perempuan dan laki-laki dalam bernegosiasi dengan pihak luar</li> <li>Pengembangan kapasitas penyuluh/fasilitator IJL yang memahami isu gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengakuan terhadap hak akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan lahan bagi perempuan dan laki-laki</li> </ul>
3. Implementasi dan monitoring pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk pembiayaan, pelaksanaan dan manfaat skema IJL yang lebih sesuai dengan kebutuhan gender baik peserta maupun non-peserta</li> <li>Forum dialog (perempuan dan laki-laki) dalam pelaksanaan pembangunan dan konservasi, termasuk dalam pembentukan skema IJL (disertai fasilitasi oleh pendamping)</li> <li>Pengembangan kelembagaan kelompok perempuan dan laki-laki tani dalam pengelolaan lingkungan, termasuk IJL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kelompok sosial, akses pasar, dan teknologi tepat guna diselaraskan dengan program pemerintah daerah setempat.</li> <li>Kesadaran masyarakat bahwa keterlibatan perempuan dan laki-laki yang setara dalam pembangunan dan pengambilan keputusan akan lebih efektif dalam mencapai kondisi “lingkungan lestari masyarakat sejahtera”</li> <li>Kebijakan pemerintah dalam hal lingkungan dan pembangunan pedesaan yang mengakui kesetaraan perempuan dan laki-laki</li> </ul>



Sensitifitas gender juga perlu diwujudkan di tingkat lokal. Misalnya, IJL dalam bentuk PKS di Singkarak harus tetap mempertimbangkan dipenuhinya kebutuhan pangan setempat. Artinya, konsep agroforestri berbasis tanaman pangan, seperti buah-buahan selain tanaman kayu, dapat diterapkan untuk menjamin kecukupan pangan keluarga dan masyarakat. Di sisi lain, pengembangan kelembagaan kelompok perempuan tani juga perlu dilakukan, agar lebih aktif dan dinamis dalam pengelolaan IJL yang lebih adil dalam mengalokasikan manfaat yang didapat oleh perempuan dan laki-laki. Bentuk-bentuk manfaat, dapat dalam bentuk modal usaha bagi kelompok usaha bersama yang dikelola perempuan dan laki-laki tani, peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal yang memudahkan dalam mengakses air bersih, akses terhadap inovasi dan teknologi pertanian.

Dari kegiatan studi di Singkarak, tampak bahwa perspektif gender baru dipahami sebagai kebutuhan perempuan, keinginan perempuan untuk emansipasi, belum kepada aspek relasi gender dalam rumah tangga, dalam komunitas, dan dalam bidang ekonomi-politik. Dalam hal ini, inisiator program dapat meminta penerima program (peserta IJL) untuk berkomitmen dalam mendukung prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam pengelolaan IJL dengan cara melakukan penilaian cepat terhadap kesenjangan gender dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Di Dusun Buluh Kapur, Sumberjaya, Lampung Barat telah diperkenalkan dengan berbagai program sebelum munculnya program IJL dalam bentuk pelatihan konservasi tanah dan air, serta kegiatan HKm. Pendekatan kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah lingkungan, terutama erosi di Sumberjaya akan lebih kaya jika menyertakan perspektif dari perempuan untuk kegiatan konservasi tanah dan air. Lagipula, perempuan dan laki-laki memiliki strategi yang berbeda dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan tanah dan air. Strategi perempuan mungkin bisa menjadi alternative solusi lain yang lebih efektif.

Di Sesaot, sebagian besar status lahan petani belum jelas dan terungkap keinginan masyarakat semua lahan garapannya mendapatkan ijin HKm secara resmi karena Tahura tidak memperbolehkan masyarakat masuk ke hutan. Masyarakat saat

ini sebagai perintis HKm (Hutan Kemasyarakatan), ingin generasi selanjutnya dibekali keterampilan untuk menambah nilai ekonomis komoditas pertanian (misalnya pabrik pengelolaan durian sebagai ciri khas daerah) agar mendapatkan masa depan yang lebih baik. Sedangkan, harapan para perempuan lebih berfokus ke hasil hutan non-kayu. Perempuan berharap meningkatkan hasilnya dan mengelola bahan mentah tersebut sehingga membuka peluang kerja dan peningkatan pendapatan dari hasil paska panen. Kebutuhan gender strategis yang mengemuka dalam diskusi terkait peranan perempuan dan bagaimana meningkatkan kapasitas perempuan dalam kelembagaan pengelolaan hutan Sesaot. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan kelembagaan maupun pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan.

Keterlibatan perempuan terhalang masalah adat dan budaya yang membatasi ruang gerak perempuan. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai gender dalam berbagai dimensi kehidupan dapat diintegrasikan dalam pembelajaran formal di sekolah. Hal ini dapat secara perlahan mengubah tradisi yang bisa mendiskreditkan peran perempuan. Secara nonformal, diperlukan juga adanya forum-forum untuk membahas isu-isu gender dan lingkungan hidup dan dampaknya bagi kesehatan, dan pelatihan tentang pengembangan kesadaran gender untuk memperluas perspektif akan persamaan dan perbedaan (pluralistik). Diupayakan target peserta adalah para tokoh masyarakat atau pengambil keputusan di berbagai lembaga kemasyarakatan. Hal ini perlu dilakukan secara berkesinambungan mengingat perspektif gender yang ada saat ini merupakan akumulasi pengalaman masa lalu.

Dalam proses pendampingan implementasi IJL, fasilitator perlu selalu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan IJL, baik dari sisi capaian kerja, kelembagaan, maupun pemanfaatan imbal jasa lingkungan yang diberikan. Imbal jasa lingkungan yang diberikan dapat didiskusikan dalam forum pertemuan dan mengutamakan kebutuhan mendesak dari peserta dan keluarganya, termasuk kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan, seperti masalah kesehatan reproduksi, pendidikan usia dini, gizi masyarakat, dan lansia. Secara teknis, pelatihan kelompok perempuan dilakukan terpisah dengan pelatihan kelompok laki-laki. Apabila disatukan kecenderungannya perempuan segan/tidak akan berani bersuara.



▲ Perempuan perlu diberi ruang dan waktu, yang memungkinkan mereka untuk menggali ilmu sambil tetap mengasuh anak dan berkontribusi terhadap keuangan keluarga (foto:Yeni Angreiny/World Agroforestry Centre)

Pelatihan atau kegiatan apapun yang melibatkan perempuan sebaiknya dilakukan di lokasi yang mudah terjangkau dengan mempertimbangkan kepentingan mereka. Misalnya saja, biasanya anak balita masih harus ikut dengan ibunya, maka diberi ruang yang memungkinkan untuk perempuan menggali ilmu sambil tetap mengasuh anaknya.

Aspek pembiayaan menjadi isu yang mengemuka dalam pengelolaan IJL di masa depan. Selain didukung oleh perjanjian kerjasama IJL antara penyedia jasing dan pembeli jasa, perencanaan anggaran IJL yang responsif gender perlu dibuat. Prinsip anggaran ini adalah, perencanaan IJL telah mempertimbangkan siapa melakukan apa dalam skema IJL yang ditentukan oleh kebutuhan, minat, kemampuan, dan manfaat yang dapat diraih dalam IJL. Dampak pada tanaman, risiko dan manfaat yang didapat oleh perempuan dan laki-laki atas kesertaan dalam IJL juga menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran.

Mempertimbangkan bahwa belum banyak pihak memahami perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, untuk skema IJL, para pihak dalam IJL (pembeli jasing, penyedia jasing, pendamping, perwakilan kelompok pemanfaat laki-laki dan perempuan), perlu melakukan perencanaan dan penganggaran ini sedari awal. Penganggaran dilakukan melalui proses bersama yang melibatkan segenap pihak dalam IJL tersebut.

Relasi gender yang harmonis dalam keluarga dan publik hanya dapat terwujud apabila dimilikinya empati dan persepsi positif mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Pada tingkat kebijakan, skema IJL yang responsif gender, dapat dibangun melalui desain dan pelaksanaan IJL yang mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, aspirasi perempuan dan laki-laki, dan kemampuan yang dimiliki. Kebijakan pembangunan di tingkat lokal pun seyogyanya selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan regional yang berprinsip mengutamakan kesetaraan dan keadilan (termasuk gender). Melalui IJL yang lebih sensitif dan responsif gender, diharapkan IJL dapat memberikan manfaat yang maksimal baik bagi peserta IJL, maupun bagi non peserta (*non beneficiary*) IJL secara lebih berkelanjutan.

#### 4.2.2. Tolok ukur dan indikator skema responsif gender

Merujuk pada telaah skema IJL, analisis sosial budaya di lokasi skema IJL, dan pandangan peserta IJL tentang peran laki-laki dan perempuan, telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya bahwa kebijakan skema IJL senantiasa berprinsip efisiensi (*efficiency*) dan adil (*fairness*) termasuk keadilan gender. Implikasi hal ini, dalam penetapan strategi pengembangan skema IJL responsif gender yang akan diwujudkan memerlukan kesepahaman para pihak, mengenai ketiga hal berikut. Pertama, kesepakatan status responsif gender pada skema IJL yang berlangsung sebagai kondisi *baseline*; kedua, perencanaan dan disain skema IJL responsif gender itu terwujud; dan ketiga aktivitas nyata guna mewujudkan skema IJL responsif gender.

Ketersediaan data terpilah menjadi penting untuk dimiliki dalam pengelolaan IJL. Data terpilah yang dimaksud harus dapat menunjukkan gambaran dalam tahap perencanaan IJL, pelaksanaan (penanaman, pemeliharaan, panen), dan distribusi manfaat, seperti apa relasi gender yang terbentuk. Dari sini, akan tampak sejauh mana IJL telah mempertimbangkan sensitifitas gender. Distribusi manfaat dari program IJL dapat didialogkan melalui forum kelompok tani atau forum IJL setempat. Peran fasilitator/penyuluh di IJL beserta tokoh masyarakat dibutuhkan untuk memfasilitasi agar kemanfaatan IJL dapat dirasakan oleh semua pihak, dan tidak semata dalam bentuk tunai.

Berkaitan dengan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan perubahan di bidang pertanian dan sumberdaya alam, perlu dipastikan kemanfaatan yang didapat oleh perempuan, keluarga, dan masyarakat. Hal ini juga dikemukakan dalam dokumen ringkasan Women's Carbon Standard (WCS), bahwa terdapat enam domain menurut WCS perlu dipastikan kemanfaatan yang dapat diraih oleh beneficiaries dalam hal pendapatan dan aset, waktu, pendidikan/pengetahuan, kepemimpinan, ketahanan pangan dan kesehatan. Pada Tabel 4.3 dikemukakan contoh tentang tolak ukur dan indikator yang memperlihatkan manfaat yang didapat oleh perempuan dan laki-laki dalam program lingkungan dan sumberdaya alam.

Tabel 4.3. Contoh tolak ukur manfaat dan indikator dengan disagregasi data terpilah menurut perempuan dan laki-laki

Dimensi manfaat	Contoh manfaat	Contoh indikator
Pendapatan dan aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabungan masyarakat meningkat</li> <li>• Tabungan dikontrol oleh perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya aset (lahan, tanaman, peralatan, dan ternak)</li> </ul>
Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kesejahteraan</li> <li>• dan produktivitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu luang/relaks meningkat</li> <li>• Meningkatnya pekerjaan yang dilakukan bersama antara laki-laki dan perempuan</li> </ul>
Pendidikan dan pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buta huruf berkurang, kemampuan bisnis dan pengelolaan pertanian pemeliharaan kesehatan membaik</li> </ul>
Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran pengambilan keputusan oleh perempuan meningkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya representasi perempuan dalam lembaga/ organisasi</li> </ul>
Ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan ketahanan pangan/berkurangnya kelaparan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkurangnya masa dimana pangan sulit didapat</li> </ul>
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya derajat kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udara bersih, kualitas air membaik</li> </ul>

# Bab 5

---

## Temuan kunci dan rekomendasi

*Beria Leimona, Siti Amanah, Titik Sumarti, Rachman Pasha*

Imbal Jasa Lingkungan (IJL) Sensitif dan Responsif Gender adalah skema IJL yang mempertimbangkan relasi gender yang adil dan setara dalam proses disain, negosiasi, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan skema untuk memenuhi kebutuhan gender praktis (fisik) dan strategis (psikis dan pengambilan keputusan) bagi anggota masyarakat perempuan dan laki-laki.

**S**tudi kasus skema IJL di tiga lokasi memperlihatkan latar belakang masyarakat penyedia jasa lingkungan di Singkarak (Sumatera Barat), Sumberjaya (Lampung), dan Sesaot (Nusa Tenggara Barat) yang bervariasi. Petani dalam skema IJL di Sumatera Barat merupakan etnik Minang dengan ciri utama adat bersendi ajaran agama, kelompok Kali Bersih di Lampung merupakan komunitas transmigran Jawa dengan budaya Jawa yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan masyarakat penyedia jasa lingkungan dalam Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Lombok merupakan etnik Sasak dengan ketaatan yang tinggi terhadap pemimpin setempat. Bab ini memaparkan rangkuman kondisi kesenjangan gender, sintesis dan rekomendasi tentang aspek gender yang adil dan setara, sebagai masukan bagi pengembangan skema IJL di Indonesia.

Skema IJL yang sensitif dan responsif gender diwujudkan dengan melibatkan perempuan dan laki-laki di setiap tahap disain, negosiasi, implementasi dan monitoring pelaksanaan skema. Pengelolaan skema IJL berperspektif gender merupakan kebutuhan, mengingat setiap individu baik laki-laki maupun perempuan memerlukan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik bagi

kelangsungan hidup. Terdapat beragam potensi lingkungan yang dapat dikelola oleh komunitas untuk menghasilkan nilai tambah, tidak saja dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, dan lingkungan. Isu gender dalam skema IJL yang dapat diuraikan sebagai berikut.

## 5.1. Isu kunci gender

***Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan peran di ranah domestik dan publik, dan terdapat stereotipi dan subordinasi perempuan, terutama di ranah publik.***

Sebagian besar masyarakat pedesaan di lokasi studi berpandangan bahwa gender berkonotasi ‘perempuan’, emansipasi, dan tidak menganggap penting isu gender. Berdasarkan analisis gender di tingkat rumah tangga, tampak bahwa isu stereotipi dan subordinasi merupakan dua isu yang mengemuka di ranah domestik dan publik. Hal ini dapat ditemukan dalam profil aktivitas, baik dalam mengakses dan memanfaatkan sumberdaya, maupun dalam mengawasi pemanfaatan sumberdaya. Sumberdaya dalam hal ini, tidak terbatas sumberdaya alam, tetapi menyangkut pula sumberdaya modal, informasi, dan teknologi.

Isu stereotipi berkaitan dengan pandangan para pihak di dalam IJL yang masih memaknai gender berdasarkan ciri-ciri fisik dan kodrati. Persepsi tentang peran perempuan dan laki-laki ini disebabkan pandangan masyarakat bahwa peran yang membutuhkan tanggungjawab dan kekuatan fisik adalah peran laki-laki. Isu subordinasi berkaitan pandangan yang menganggap salah satu pihak, perempuan atau laki-laki, berstatus “lebih rendah”. Isu subordinasi berdampak terhadap semakin lebarnya kesenjangan dalam akses, pengawasan, dan kemanfaatan dari skema IJL. Beberapa pandangan subordinasi dalam IJL yang mengemuka, di antaranya, perempuan dianggap tidak ahli dalam ranah publik, tidak terampil dalam mengakses sumberdaya dan manfaat serta mengawasi pengelolaan IJL dan atau pada aktivitas non-domestik. Perempuan lebih banyak terlibat dalam aktivitas yang melibatkan sesama perempuan atau pada aktivitas yang menurut adat budaya, sifat dan fisik, dipersepsikan sebagai domain perempuan. Dalam kondisi ini, perempuan diperbolehkan

mengakses peran-peran di luar domestik setelah peran domestiknya selesai. Hal ini mengakibatkan aspek personal (kepribadian) kaum perempuan tersebut menjadi lemah. Ciri tersebut tercermin pada sikap kurang percaya diri, kurang kuat dalam berorganisasi, kepemimpinan, dan sikap apriori. Pada gilirannya, sedikit demi sedikit, perempuan menarik diri dari aktivitas IJL, padahal skema IJL memerlukan keterlibatan perempuan dari sisi disain IJL, implementasi, pengendalian IJL dan pembagian hasil dan manfaat IJL (pengambilan keputusan) yang lebih adil dan merata.

### ***Kesenjangan gender mempengaruhi partisipasi, akses dan kontrol terhadap program IJL***

Pada umumnya, partisipasi terhadap program IJL terbuka baik untuk perempuan maupun laki-laki. Namun, terdapat beberapa faktor yang membatasi peran serta perempuan dalam program IJL, seperti:

- Faktor sosial berupa nilai/norma tentang pantas dan tidak pantas perempuan terlibat dalam kegiatan publik (pembagian peran yang bias gender),
- Kondisi fisik alam, waktu dan jenis fisik pekerjaan dari skema IJL. Beberapa kegiatan IJL berhubungan dengan pengelolaan lahan, termasuk lahan terdegradasi dan hutan yang secara lokasi sulit diakses oleh perempuan, serta memerlukan tenaga fisik seperti membuat bendungan penahan erosi. Waktu pelaksanaan pertemuan dan pelatihan banyak dilakukan di malam hari setelah anggota masyarakat mempunyai waktu luang. Di beberapa desa tanpa listrik, kondisi ini menyulitkan keterlibatan perempuan karena faktor keamanan dan kesibukan perempuan menjaga anak di malam hari (lihat poin di bawah).
- Masih adanya beban kerja ganda pada perempuan terkait dengan faktor budaya berumah tangga. Perempuan sebagai penyangga kehidupan keluarga sekaligus membantu mencari nafkah rumah tangga. Hal ini menyebabkan terbatasnya waktu perempuan untuk terlibat pada kegiatan di luar ranah domestik.
- Ketidakpercayaan akan kemampuan perempuan (baik dari sisi laki-laki maupun perempuan) dalam pengelolaan IJL, terutama pengambilan keputusan dengan kepemimpinan didominasi laki-laki.



Di sisi lain, skema IJL merupakan skema yang cukup baru di Indonesia sehingga terbatasnya pengetahuan mengenai IJL sensitif dan responsif gender. Dalam hal ini, komponen gender telah diterapkan secara tidak langsung dan belum komprehensif karena praktisi IJL masih berkonsentrasi terhadap pengenalan konsep dan aksi lapang secara umum.

## 5.2. IJL responsif dan sensitif gender

Skema IJL memiliki prospek cerah terkait upaya penjaminan kualitas sumber daya alam dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. IJL memerlukan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara setara dan adil. Peran intermedator dan fasilitator yang sensitif gender sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan kontrak PES dengan pembeli jasa lingkungan.

### ***Pemenuhan kebutuhan gender sebagai program pembangunan terintegrasi dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals)***

Nilai-nilai dan norma bias gender masih kuat berpengaruh secara adat, sosial dan budaya. Dalam pandangan sensitifitas gender, dialog secara terus menerus antara laki-laki dan perempuan difasilitasi pihak ketiga yang netral dapat dikembangkan, sehingga masing-masing pihak memiliki komitmen bersama menunaikan tugas dan perannya baik dalam ranah domestik, maupun publik. Proses perubahan nilai ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami konsep gender dan mulai menyadari pengaruh persepsi gender pada pembagian peran dalam rumah tangga. Diperlukan keharmonisan dan kesetaraan gender dalam pelaksanaan tugas domestik dan publik, sehingga dapat dihindari adanya subordinasi dan marjinalisasi. Pada tahap ini dipahami perbedaan antara gender sebagai konstruksi sosial dan bukan sebagai perbedaan biologis, yang memang secara permanen membedakan antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, dipahami bahwa peran yang dibangun secara sosial bukan hal mutlak namun terbuka bagi perubahan sesuai dengan kebutuhan. Secara singkat, diharapkan bahwa anggota masyarakat memahami perbedaan perempuan dan laki-

laki adalah “pembedaan sifat, peran, dan posisi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat, dipengaruhi oleh sistem dan persepsi yang bias faktor dominan, budaya, sistem ekonomi dan politik, kepercayaan dan penafsiran yang keliru tentang posisi perempuan menurut agama.”

***Skema IJL berperspektif gender memerlukan pemahaman akan kebutuhan gender oleh para pihak yang terlibat dalam berbagai tahap pengembangan dan pelaksanaannya.***

Kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan berbeda, dan perbedaan tersebut harus dipertimbangkan dalam skema IJL. Relasi gender dalam keluarga menentukan peluang perempuan berpartisipasi di ruang publik. Masyarakat penyedia jasa lingkungan memerlukan pendampingan dari fasilitator, penguatan kelompok pengelola IJL, pengembangan kerjasama dengan pembeli jasa lingkungan, dan penguatan kelembagaan pengelola IJL. Seluruh pemangku kepentingan dalam skema IJL perlu memiliki komitmen kesadaran gender yang kuat agar dapat menjamin IJL dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik laki-laki dan perempuan serta kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang lebih baik dari sisi sosial, ekonomi, kelestarian, dan keindahan.

Kejelasan kesepakatan kerjasama antara penyedia jasa dengan pihak pembeli diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat memerlukan dukungan dan pendampingan saat menyusun draft kerjasama dan bernegosiasi dengan sponsor. Hal ini meliputi kesepakatan tentang kesesuaian imbalan dengan kebutuhan dan biaya yang dikeluarkan, dan aspek gender, termasuk kebutuhan gender.

***Imbalan program IJL dalam bentuk natura memperluas jangkauan manfaat bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak dan lanjut usia (lansia)***

Dalam IJL, pemberian imbalan dapat berupa uang maupun bentuk natura lainnya, seperti mikrohidro di Sumberjaya. Bentuk imbalan natura dianggap kurang efektif karena diasumsikan dapat dinikmati oleh banyak pihak, termasuk yang tidak terlibat dalam kegiatan konservasi. Dengan kondisi kesenjangan gender, dimana perbedaan kesempatan mengakses manfaat didukung oleh faktor sosial budaya

yang bias gender, bentuk imbal natura dari IJL memungkinkan perempuan, anak-anak, dan lansia mendapatkan manfaat dari imbal tersebut. Hal ini diperkuat bahwa di banyak lokasi, laki-laki sebagai penandatanganan kontrak dan secara otomatis menerima uang dari imbal IJL serta berperan sebagai pengambil keputusan 'penting' dalam rumah tangga, terutama keputusan mengeluarkan uang. Terdapat pula asumsi bahwa imbalan cukup diberikan kepada peserta penyedia jasa lingkungan laki-laki dan asumsi bahwa akan tersalur langsung kepada perempuan dan anak. Pada skema IJL sensitif dan responsif gender, pengasumsian tersebut harus dihindari dengan cara berkonsultasi langsung dan berinteraksi dengan perempuan.

***Prinsip kesetaraan dan keadilan gender merupakan arus utama dalam struktur pengelolaan skema dan kelembagaan, manajemen sistem informasi, dan pendataan dalam skema IJL.***

Secara singkat, kebutuhan gender praktis dan strategis perlu mempertimbangkan hal-hal yang meliputi:

- Penyediaan jasa lingkungan berbasis lahan memperhatikan isu **ketahanan pangan dan gizi** (*food and nutrition security*) untuk mengurangi kondisi rentan pangan di masyarakat. Secara budaya, pemenuhan pangan di tingkat rumah tangga menjadi ranah tanggung jawab perempuan, terutama berkaitan

dengan kebutuhan dasar pertumbuhan anak. Dalam hal ini, penanaman pohon dan pengelolaan lahan mempertimbangkan diversitas jenis tanaman yang menjamin ketersediaan pangan keluarga yang sekaligus memenuhi kebutuhan peningkatan suplai JL seperti dalam kontrak IJL.

Panen kopi di Sumberjaya dilakukan bersama-sama anggota keluarga perempuan dan laki-laki (foto: World Agroforestry Centre)



- Konservasi lahan dan air untuk pelestarian jasa lingkungan mengadopsi **kearifan lokal** bagi keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam skema IJL. Hal ini tertuang dalam aktivitas konservasi dalam kontrak IJL dan perlu terintegrasi dalam program pembangunan pedesaan secara luas.
- Reformasi adat, sosial dan budaya ke arah kesetaraan dan keadilan gender, termasuk **pengakuan terhadap akses dan kontrol** terhadap sumberdaya alam dan lahan bagi perempuan dan laki-laki merupakan prasyarat skema IJL yang sensitif dan responsif gender. Dalam hal ini, skema IJL secara independen tidak mungkin mengubah suatu kondisi adat, sosial dan budaya yang telah mengakar dalam peri kehidupan masyarakat.
- **Pengetahuan dan kapasitas setara** perlu dikembangkan secara berkelanjutan di antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut meliputi konsep IJL, tata cara pelaksanaannya, tanggung jawab sebagai penyedia JL, negosiasi dengan pihak eksternal termasuk fasilitator dan pemanfaat/pembeli JL, isi kontrak dan akses untuk mendapat manfaat dari skema IJL.
- Fasilitator dan manajemen program IJL, sebagai inovator program dan pihak eksternal, perlu **mengarusutamakan gender** dalam IJL. Fasilitator, pengurus IJL di lapangan, dan kader IJL (jika ada) perlu memiliki kemampuan tentang penyediaan data terpilah gender, analisis kebutuhan gender, dan pengelolaan IJL yang sensitif dan responsif gender. Koordinator program perlu memastikan bahwa seluruh siklus IJL termasuk penentuan manfaat IJL telah didasarkan pada kebutuhan gender, serta menghindari terjadinya bias gender dan beban ganda. Bias gender dapat dicirikan oleh program yang hanya mempertimbangkan salah satu pihak dalam perencanaan,

Pengetahuan dan kapasitas setara bagi perempuan dan laki-laki (foto: The Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI))



pelaksanaan, dan evaluasi IJL. Di sisi lain, beban ganda dapat dihindari, apabila pelibatan perempuan dan laki-laki dalam IJL telah mempertimbangkan profil aktivitas sehari-hari kedua belah pihak di ranah domestik dan publik, minat, curahan kerja; dan implikasi keterlibatan masing-masing baik secara individu, keluarga maupun masyarakat.

## Daftar pustaka

---

- Aguilar L, Castaneda I. 2001. About fishermen, fisherwomen, oceans and tides: A gender perspective in marine-coastal zones. San Jose, IUCN-ORMA, Costa Rica.
- Amanah S. 2007. Kearifan lokal dalam pengembangan masyarakat pesisir. CV Citra Praya, Bandung, Indonesia.
- Arifin B. 2005. Institutional constraints and opportunities in developing environmental service markets: Lessons from institutional studies in Indonesia. RUPES Program, World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, Indonesia.
- Arzaki D, dkk. 2001. Nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal. Suku Bangsa Sasak dalam pluralisme kehidupan bermasyarakat. REDAM (Relawan Untuk Demokrasi dan HAM), Mataram, Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2001. Analisis gender dalam pembangunan pertanian: Aplikasi gender analysis pathway (GAP). Bappenas bekerjasama dengan Women's Support Project II - CIDA, 2001, Jakarta, Indonesia.
- Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2009. Perubahan sebagian fungsi Hutan Lindung Sesaot menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa. Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Edmond J, 2008. Incorporating gender into PHE strategies: experiences from conservation international. USAID dan Conservation International.
- Engel S, Stefano P, Wunder S. 2008. Designing payments for Environmental Services in Theory and Practice: An overview of the issues. *Ecological Economic* No. 65 (2008) 663 – 674.
- Grieg-Gran M, Porras I, Wunder S. 2005. How can market mechanisms for forest environmental services help the poor? Preliminary lessons from Latin America. *World Development* 33 (9): 1511-1527.

- Huang M, Upadhyaya, Shyam K, Winrock International. 2007. Watershed-based payment for environmental services in Asia . Working Paper No. 06-07 August 2007. Sustainable Agriculture and Natural Resource Management Collaborative Research Support Program (SANREM CRSP). Office of International Research, Education, and Development (OIREd), Virginia Tech.
- Kantor Desa Sesaot. 2010. Monografi Desa Sesaot Tahun 2010. Pemerintah Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Konsepsi. 2009. Peran independent body bestari community fund dan mekanisme administrasi penghubung hulu-hilir. (Bahan Presentasi, tidak diterbitkan).
- Konsepsi. 2010. Fasilitasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Lestari dan Adaptasi Lokal Terhadap Isu Perubahan Iklim dan Kesejahteraan. (Bahan Presentasi, tidak diterbitkan).
- Leimona B, Boer R, Arifin B, Mudiyarso D, vanNoordwijk M. 2006. Singkarak. Combining environmental service markets for carbon and watershed Function? In: Mudiyarso, D., Skutsch, M. (Eds.), Community forest management as a carbon mitigation option: Case studies. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor. p125.
- Leimona B, Joshi L, Van Noordwijk M. 2009. Can rewards for environmental services benefit the poor? Lessons from Asia. *International Journal of the Commons* 3. 82-107.
- Leimona B, Pasha R, Rahadian NP. 2010. The livelihood impacts of incentive payments for watershed management in West Java, Indonesia. In *Livelihoods in the REDD?: Payments for Environmental Services, Forest Conservation and Climate Change*, edited by L. Tacconi, S. Mahanty and H. Suich. Edward Elgar, Cheltenham.
- Leimona B. 2005. RUPES: A Step Forward in Padilla JE, Tongson EE, and Lasco RD (eds). PES: Sustainable financing for conservation and development. Proceedings from the National Conference-Workshop on Payments for Environmental Services: Direct Incentives for Biodiversity Conservation and Poverty Alleviation. March 1-2, 2005, Manila, Philipina.
- March C, Smyth I, and Mukhopadhyay M. 1999. A guide to gender-analysis frameworks. Oxfam Publishing, London, England.

- Millenium Ecosystem Assesment. 2005. Ecosystem and Human Well-being: Synthesis, Island Press, Washington DC, USA.
- Pagiola S, Arcenas A, and Platais G. 2005. Can payments for environmental services help reduce poverty? An Exploration of the issues and the evidence to date from Latin America. *World Development* 33 (2):237-253.
- Pasha R, Asmawan T, Leimona B, Setiawan E, Wijaya CI. 2012. Commoditized or coinvested environment services? Rewards for environmental services scheme: rivercare program, Way Besai Watershed, Lampung, Indonesia. ICRAF Working Paper, nr 148. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre – ICRAF, SEA Regional Program. p27.
- Pasha R, Setiawan E, Asmawan T, Nuranjani A, Subagyo E. 2008. Exploring and developing reward mechanisms for upland farmers for watershed function in Sumberjaya, Participatory Landscape Appraisal (PaLA) Report. World Agroforestry Centre. Bogor, Indonesia.
- Sudirman. 2006. Melegalkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan. Program Forests dan Governance. Governance Brief Nomor 32, Juni 2006.
- Sugiah SM, Puspitawati H, Windarty H. 2003. Pemberdayaan wanita dalam pembangunan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian, IPB, Bogor, Indonesia.
- Suyanto S, Leimona B, vanNoordwijk M, Galudra G. 2008. Conditional tenure as a reward for environmental services. RUPES Synthesis Notes.
- Suyanto S, Leimona B, Permana R, Chandler FJC. 2005. Review of the development environmental services market in Indonesia. World Agroforestry Centre, Southeast Asia Regional Office, Bogor, Indonesia.
- Syafruddin. 2006. Perlawanan perempuan Sasak (Perspektif feminism). Mataram University Press. Mataram, Indonesia.
- Tacconi L, Sango M, Helen S. 2009. Assessing the livelihood impacts of payments for environmental services: implications for avoided deforestation. XIII World Forestry Congress Buenos Aires, Argentina, 18 – 23 October 2009.
- UNIFEM. 2002. Progress of the World's Women 2002. UNIFEM Biennial Report. New York, USA.



- VanNoordwijk M, Leimona B. 2010. Principles for fairness and efficiency in enhancing environmental services in Asia: payments, compensation, or co-investment? *Ecology and Society* 15.
- VanNoordwijk M, Leimona B. 2010. Principles for fairness and efficiency in enhancing environmental services in Asia: payments, compensation, or co-investment? *Ecology and Society* 15 (4).
- Wijaya, Hesti R. 2009. Identifikasi kebutuhan teknologi pertanian dalam usaha pertanian semi arid menurut perspektif petani perempuan: tantangan bagi peneliti. *Agritek* Vol 17. No.6: November 2009: 1085-1095.
- Wunder S. 2005. Payments for Environmental Services: Some Nuts and Bolts. Occasional Paper No. 42. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Wunder S. 2008. Payments for environmental services and poor: Concepts and preliminary evidence. *Environment and development economics* 13 (3).

Skema Imbal Jasa Lingkungan (IJL) Sensitif dan Responsif Gender adalah skema IJL yang mempertimbangkan relasi gender yang adil dan setara dalam proses disain, negosiasi, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan skema untuk memenuhi kebutuhan gender praktis (fisik) dan strategis (psikis dan pengambilan keputusan) bagi anggota masyarakat perempuan dan laki-laki.

Studi kasus skema di Singkarak (Sumatera Barat), Sumberjaya (Lampung), dan Sesaot (Nusa Tenggara Barat) memperlihatkan latar belakang masyarakat penyedia jasa lingkungan yang bervariasi. Buku ini merangkum kondisi kesenjangan gender berdasarkan studi di tiga lokasi, mensintesis dan memberikan rekomendasi terhadap aspek gender yang adil dan setara sebagai masukan bagi pengembangan skema Imbal Jasa Lingkungan di Indonesia.

